



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).

Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan rapat paripurna DPRD. Penyusunan (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 ini berpedoman kepada pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2010 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 – 2010. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Bone Bolango Tahun 2010 disusun secara komprehensif, integratif dan informatif yang bertujuan agar informasi yang disampaikan dalam LKPJ dapat menjadi



instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi kedepan dalam memenuhi target RPJMD 2005-2010.

Laporan ini juga merupakan *progress report* tahun 2010, tahun kelima (periode 2005– 2010) dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati Bone Bolango kepada rakyat melalui DPRD. Dalam laporan ini dijabarkan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2010.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2010 adalah Untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggara pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

3. Landasan Penyusunan

Di samping itu, penyusunan LKPJ ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);



3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

4. Sistematika Penulisan.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Umum
2. Tujuan dan Sasaran
3. Landasan Penyusunan

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis.
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Sosial Ekonomi;
 - a. Kondisi Sosial
 - b. Potensi Unggulan Daerah
 - c. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

BAB 3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah



2. Target Dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan Dan Solusi

BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi

BAB 5 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
 4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan Dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB 6 PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi



- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
 - 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
 - 5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
 - 1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - 2. Sumber Anggaran
 - 3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Gangguan Yang Tejadi (konflik bebbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
 - 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penaggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BAB 7 PENUTUP



B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

❖ Batas Wilayah

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan sebelah Barat dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara dan Kota Selatan Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkaran dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

Tabel 1.1.
Gambaran Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Bone Bolango

BATAS WILAYAH	BERBATASAN
Sebelah Utara	Kec. Atinggola dan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kota Gorontalo : Kec. Kota Selatan
Sebelah Barat	Kab. Gorontalo: Kec. Telaga Kota Gorontalo: Kec. Kota Utara, Kec. Kota Timur

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango



❖ Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km² yang tersebar pada 17 kecamatan dan 1 Kecamatan Persiapan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Propinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Menurut Kecamatan Tahun 2010

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1. Tapa	64,41	3,26
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur *)	489,20	24,55
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
JUMLAH	1984,58	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

*) Masih termasuk Kec. Persiapan Pinogu

❖ Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan). Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- a. Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.



- b. Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- c. Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada **Tabel 1.3** berikut :

Tabel 1.3.
Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Bolango
dari Permukaan Laut

KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT	LUAS (Ha)
25 – 100 meter	14,41
100 – 500 meter	48,65
500 – 1000 meter	27,85
> 1000 meter	9,09

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah ± 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

2. Gambaran Umum Demografis

❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 sebanyak 141,721 jiwa (angka sementara) berdasarkan data BPS Kabupaten Bone Bolango yang tersebar pada 18 kecamatan.

Tabel 1.4.
Perkembangan Penduduk dan Kepadatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

TAHUN	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (KM ²)
2009	131.781	67 jiwa
2010	141.721	71 Jiwa

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango



❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk di setiap kecamatan dari Tahun 2009 serta tahun 2010 (Data Adminduk) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 –2010

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desa Per-Tahun	
		2009	2010
1.	Tapa	6.575	6.876
2.	Bulango Utara	6.537	6.908
3.	Bulango Selatan	8.775	9.570
4.	Bulango Timur	5.325	4.989
5.	Bulango Ulu	3.046	3.602
6.	Kabila	18.795	21.023
7.	Botupingge	5.462	5.591
8.	Tilongkabila	15.37	16.568
9.	Suwawa	9.881	10.618
10.	Suwawa Selatan	45.10	4.791
11.	Suwawa Timur	5.815	6.635
12.	Suwawa Tengah	5.201	5.710
13.	Kabila Bone	9.176	9.796
14.	Bonepantai	9.331	9.746
15.	Bulawa	4.707	5.875
16.	Bone Raya	4.979	8.641
17.	Bone	8.307	4.782
Jumlah Total		131.797	141.721

Sumber Data :BPS Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan rata-rata penduduk per-desa, per-Km² dan per rumah tangga berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6.
Rata-rata Penduduk per Desa, per Km²,
dan per Rumah Tangga Diperinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009

Kecamatan	2009		
	Per-Desa	Per-Km ²	Per-Rumah Tangga
1. Tapa	939	102	4
2. Bulango Utara	726	37	4
3. Bulango Selatan	878	889	4
4. Bulango Timur	1.065	492	5
5. Bulango Ulu	435	39	4



6. Kabila	1.566	97	4
7. Botupingge	683	116	4
8. Tilongkabila	1.281	193	4
9. Suwawa	988	295	4
10. Suwawa Selatan	564	24	4
11. Suwawa Timur	529	12	4
12. Suwawa Tengah	867	80	4
13. Bone pantai	718	58	5
14. Kabila Bone	1.020	64	5
15. Bone Raya	622	78	4
16. Bone	639	114	4
17. Bulawa	523	42	5
Jumlah Total	839	66	4

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango
*Data 2010 sementara dalam pengolahan.

❖ Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Keluarga

Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dari tahun 2009 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.7
Kelompok Umur Penduduk
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009

Kelompok Umur	TAHUN (Jiwa)
	2009
0 - 4	10.967
5 - 9	17.070
10 - 14	16.092
15 - 19	13.827
20 - 24	11.701
25 - 29	13.225
30 - 34	13.368
35 - 39	11.656
40 - 44	10.006
45 - 49	8.413
50 - 54	6.463
55 - 59	5.284
60+	10.402

Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango
Data 2010 sementara dalam pengolahan.

Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2009 sampai dengan 2010, tidak menunjukkan perbedaan angka yang menyolok, terbukti dengan



angka sex ratio yang berkisar antara 1.01%-0,99%, seperti digambarkan Tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8.
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

TAHUN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2009	65.903	50,01	65.878	49,99	1,00
2010	71.020	50,11	70.701	49,88	1,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Jumlah penduduk hasil SP2010 sebesar 141.721 jiwa, jika dilihat laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah kecamatan Suwawa yakni sebesar 2,57 persen sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan Bulawa yakni sebesar 1,05 persen

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

Kecamatan	T A H U N (Jiwa)	
	2009	2010
1. Tapa	-4,71	1,23
2. Bulango Utara	4,37	1,49
3. Bulango Selatan	1,67	2,50
4. Bulango Timur	-0,76	1,37
5. Bulango Ulu	3,08	2,19
6. Kabila	2,60	2,53
7. Botupingge	1,35	2,21
8. Tilongkabila	4,41	2,51
9. Suwawa	-1,18	2,57
10. Suwawa Selatan	0,99	2,14
11. Suwawa Timur	4,17	1,37
12. Suwawa Tengah	4,04	2,18
13. Bonepantai	4,97	2,22
14. Kabila Bone	-2,38	2,23
15. Bone Raya	4,45	1,67
16. Bone	0,01	2,34
17. Bulawa	-7,14	1,05
Jumlah Total	0,78	2,13



3. Kondisi Sosial Ekonomi

Pembangunan kualitas hidup penduduk Bone Bolango tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bone Bolango menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2008, IPM Bone Bolango mencapai angka 70,50, meningkat sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,97. Dalam rentang 2004–2008, IPM Bone Bolango meningkat sebesar 5,50 dari angka 65,00 pada Tahun 2004 menjadi 70,50 pada Tahun 2008.

A. Kondisi Sosial

➤ Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan RPJM Nasional serta RPJMD Kabupaten Bone Bolango, maka sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selama ini mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).



Tabel 1.10
Perkembangan APK dan APM tingkat SD s/d SLTA
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

URAIAN	T A H U N (%)	
	2009	2010
Angka Partisipasi Murni (APM)		
1. Tingkat SD	93,06	98,10
2. Tingkat SMP	57,28	65,89
3. Tingkat SMA	35,62	42,66
Angka Partisipasi Kasar (APK)		
1. Tingkat SD	109,80	118,77
2. Tingkat SMP	95,52	96,27
3. Tingkat SMA	56,03	66,80
Angka Putus Sekolah (APS)		
1. Tingkat SD	0,60	0,9
2. Tingkat SMP	2,41	0,56
3. Tingkat SMA	1,73	0,69
Angka Buta Huruf 15-44 Thn	-	1,28
Angka Melek Huruf	92,09	98,72

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

URAIAN	TAHUN 2010
Angka mengulang	
1. Tingkat SD/Mi	8,7
2. Tingkat SMP/Mts	0,16
3. Tingkat SMA/MA/SMK	1,04
Angka Lulusan 2010	
1. Tingkat SD/Mi	86,7
2. Tingkat SMP/Mts	70,04
3. Tingkat SMA/MA/SMK	98,71

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat juga dari perkembangan jumlah anak didik, jumlah pendidik, kualitas pendidik dan sarana prasarana pendukung.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan potensi anak didik di Kabupaten Bone Bolango tahun 2009 sampai dengan 2010 Tabel 1.12.



Tabel 1.11
Jumlah Murid Tingkat TK s/d SMA
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 –2010

TAHUN	Jumlah Murid pada Tingkat Pendidikan (orang)			
	TK	SD/ IBTIDAIYAH	SMP/ TSANAWIYAH	SMA/ ALIYAH
2009	3,664	19,300	5,986	3,688
2010	3.094	19.405	6.235	4.008

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Sebagian besar tenaga pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kondisi tenaga pendidik yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 1.13 dan Tabel 1.14.

Tabel 1.12
Jumlah Guru Pada Tingkat TK s/d SMA
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

TAHUN	Guru pada Tingkat Pendidikan (orang)			
	TK	SD/ IBTIDAIYAH	SMP/ TSANAWIYA H	SMA/ ALIYAH
2009	245	2.404	568	325
2010	251	1.280	598	433

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.13.
Kondisi Tingkat Pendidikan Guru
Pada Tingkat SD s/d SMA
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009– 2010

TAHUN	Tingkat Pendidikan Guru SD (orang)					Tingkat Pendidikan Guru SMP (orang)				Tingkat Pendidikan Guru SMA (orang)				
	SMP	SMA	S1	S2	S3	SMA	S1	S2	S3	SMA	S1	S2	S3	
2009	-	573	208	-	-	16	418	2	-	-	14	2	5	-
2010	28	502	271	-	-	14	348	1	-	-	18	7	6	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan antara tahun 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan adanya peningkatan dari setiap jenis prasarana pendidikan. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango memang masih jauh dari



memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam rangka memenuhi standar pelayanan pendidikan yang paripurna kepada anak didik, keterbatasan tersebut bukanlah merupakan suatu hambatan dalam operasionalnya. Kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada berikut ini Tabel 1.15, Tabel 1.16, dan Tabel 1.17.

Tabel 1.14
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

TAHUN	SARANA PENDIDIKAN (Unit)			
	TK	SD/MI	SLTP/M.Ts	SLTA/MA
2009	101	136	35	16
2010	102	138	39	17

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.15
Daftar Kondisi Sarana Pendidikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

No	Sarana Pendidikan	Tahun (Unit)					
		2009			2010		
		B	RR	RB	B	RR	RB
1.	TK	-	-		121	11	193
2.	SD	730	84	25	651	93	41
3.	Madrasah Ibtidaiyah	40	3	4	40	3	4
4.	SMP	121	12	-	163	20	10
5.	Madrasah Tsanawiyah	22	-	-	37	4	5
6.	SMA	52	10	-	64	5	3
7.	Madrasah Aliyah	14	-	-	32	-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Keterangan :

- B = Baik (satuan unit)
- RR = Rusak Ringan (satuan unit)
- RB = Rusak Berat (satuan unit)

Salah satu isu global dalam konteks otonomi daerah yang seharusnya mendapat porsi penting adalah kesiapan dan kualitas SDM di daerah. Peningkatan mutu pendidikan itu sendiri tentunya tidak lepas dari perencanaan yang matang di sektor pendidikan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah meningkatkan minat baca baik terhadap anak didik maupun masyarakat. Berikut ini perkembangan jumlah perpustakaan dan jumlah buku di Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.17 dan Tabel 1.18.



Tabel 1.16
Jumlah Pembangunan Perpustakaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Umum
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

TAHUN	SD (unit)	SMP (unit)	SMA (unit)	Perpus. Umum	Perpus. Keliling	Jlh
2009				1	1	2
2010	15	2		1	1	19

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Bone Bolango

Tabel 1.17
Jumlah Pengadaan Buku yang Peruntukannya Dipisahkan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Umum di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 - 2010

TAHUN	Untuk Tingkat SD (buah)	Untuk Tingkat SMP (buah)	Untuk Tingkat SMA (buah)	Pengetahuan Umum	Lain-lain	Jumlah
2009	-	7	7	2028	-	2042
2010	-	-	-	710	-	710

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Bone Bolango

➤ Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan dapat dikatakan cukup berhasil sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai beberapa masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang optimal dapat dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi masyarakat.

Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di Bone Bolango adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi. Indikator tersebut ditentukan dengan 4 faktor utama yaitu Perilaku Masyarakat, Lingkungan, Pelayanan Kesehatan dan Faktor Genetika. Keempat factor utama ini diintervensi melalui beberapa kegiatan pokok yang mempunyai dampak ungkit besar terhadap upaya-upaya percepatan penurunan AKI, AKB, AKABA dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat serta status Angka Kesakitan dan Kondisi Penyakit Menular. Keberhasilan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai indikator output yang cukup signifikan dapat di lihat pada tabel berikut:



Kematian Ibu di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2005 sampai saat ini masih fluktuatif, tetapi telah menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun.

AKI Kabupaten Bone Bolango tahun 2009 adalah 326,3 per 100.000 KLH, atau 9 kematian dari 2.758 KLH. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 435,9 per 100.000 kelahiran hidup atau 12 kasus kematian dari 2.753 KLH. Angka ini masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target 2010 yaitu 150 per 100.000 KLH. Kematian ibu terjadi pada masa bersalin dan nifas. Kasus terdapat di 9 wilayah kerja Puskesmas yakni Puskesmas Bone, Bonepantai, Kabila Bone, Bulango, Bulango Selatan, Suwawa Tengah, Tilongkabila, Tapa dan Kabila masing-masing satu kasus.

KASUS KEMATIAN IBU

Tahun	Jumlah Kasus	Penyebab
2007	3	Perdarahan, Partus lama, Resiko Tinggi akibat umur
2008	12	<i>Suspect Ruptura Uteri</i> , Perdarahan, Partus lama, Resiko Tinggi akibat umur, <i>e klamsi</i> , serta <i>Post Sectio</i>
2009	9	infeksi, DCC/asma, IMA, help syndrome, hipoklemia dan eklamsia, Resiko Tinggi akibat umur
2010	9	Perdarahan, Partus lama, HPP, infeksi, DCC/asma, IMA, help syndrome, hipoklemia dan eklamsi

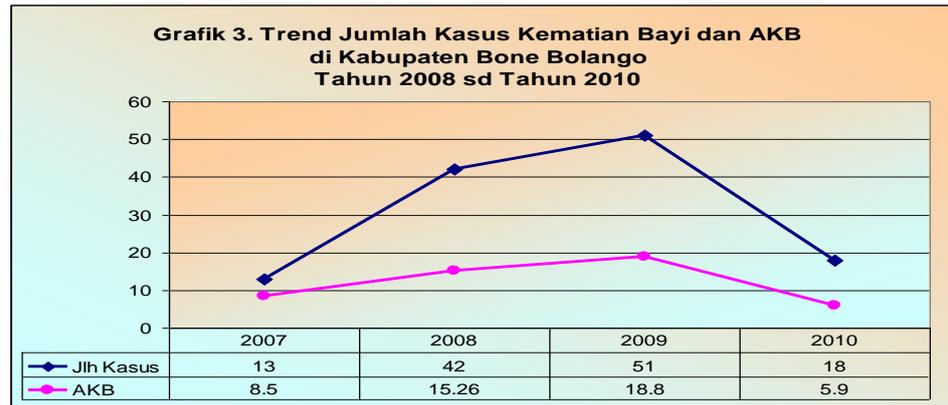
Untuk Tahun 2010 jumlah kasus kematian Ibu sampai bulan September sebesar 5 kasus.

Upaya menurunkan kematian ibu terus diupayakan melalui peningkatan jumlah desa Siaga, pemerataan sarana kesehatan, penyebaran tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat, pengembangan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), pengembangan puskesmas menjadi puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar di 3 Puskesmas, Bone Pantai, Suwawa dan Dumbayabulan), untuk memutuskan 3 Terlambat yang menjadi penyebab kematian yaitu : terlambat



mengambil keputusan, terlambat transportasi dan terlambat tindakan.

Angka Kematian Bayi (AKB)

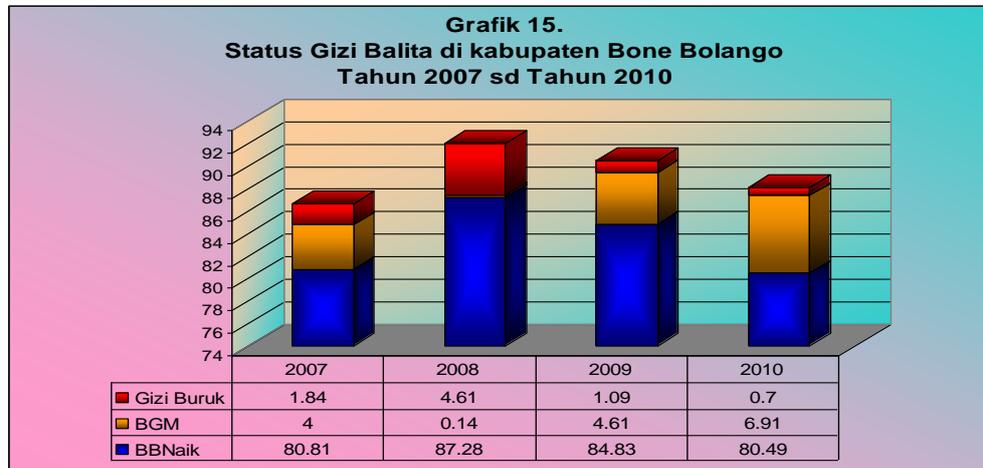


1. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kabupaten Bone Bolango masih masih tinggi . Tahun 2009 sebesar 18,8 per 1.000 KLH atau 51 orang per 2.716 KLH. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2008.

Untuk Tahun 2010 jumlah kasus kematian bayi sampai bulan September sebesar 18 kasus.

Status Gizi Balita



Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun walaupun masih fluktuatif. Penurunan prevalensi ini karena berbagai upaya penanggulangan yang dimulai dari deteksi dini, hingga rujukan ke Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan pemberian makanan tambahan kepada balita gizi kurang dan gizi buruk.

Perkembangan indikator ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan antara tahun 2009 sampai dengan awal 2010 menunjukkan adanya peningkatan dari setiap jenis prasarana kesehatan. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango memang masih jauh dari memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam rangka memenuhi standar pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat, keterbatasan tersebut bukanlah merupakan suatu hambatan dalam operasionalnya.

Sarana kesehatan di dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 19 unit, Puskesmas Pembantu 33 unit, Puskesmas Keliling sebanyak 18 unit, yang meningkat dari tahun sebelumnya hanya 14 unit di tahun 2008, Polindes 27 unit, Posyandu 218 unit, Poskesdes 49 unit .

Tabel 1.18
Trend Perkembangan Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango tahun 2006-2010

No	Sarana	2006	2007	2008	2009	2010
----	--------	------	------	------	------	------



1	Rumah Sakit	1	1	2	2	2
2	Puskesmas (PKM)	11	11	14	18	19
3	PKM Perawatan	3	3	2	2	2
4	PONED	-	-	2	2	3
5	PKM Pembantu	38	38	36	36	33
6	Polindes	52	50	48	48	27
7	Posyandu	168	156	197	204	218
8	Poskesdes	-	-	16	24	49
9	TFC	-	-	-	1	1
10	Pusling (R4)	7	9	14	18	18

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Salah satu faktor yang menunjang perbaikan derajat kesehatan penduduk Bone Bolango juga adalah kualitas maupun kuantitas SDM kesehatan. Kondisi Kabupaten Bone Bolango yang memiliki 2 (dua) buah Rumah Sakit Umum Daerah, menuntut daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan dalam menunjang operasional rumah sakit tersebut sehingga dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Kondisi tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel 1.18).

Tabel 1.18
Daftar Potensi Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Per -Tahun (orang)	
	2009	2010
1. Dokter Spesialis	2	4
2. Dokter Umum	11	10
3. Dokter Gigi	1	1
4. Perawat	58	74
5. Bidan	51	48
6. Dukun Anak	-	58
7. Ahli Kesehatan Masyarakat	38	49



8. Apoteker	1	1
9. Ahli Gizi	18	48
10. Analis Laboratorium	4	4
11. Penata Rontgen	5	5
12. Ahli Penyehatan Lingkungan	18	21
13. Bidan Desa	50	52

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan indikator kesehatan reproduksi masyarakat Bone Bolango antara tahun 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan adanya perbaikan, baik dari indikator keikutsertaan pada program KB maupun pada jumlah penggunaan alat KB oleh masyarakat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini (**Tabel 1.19 dan Tabel 1.20**)

Tabel 1.19
Indikator Keberhasilan Kesehatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2010

INDIKATOR	2009	2010
1. Angka Kematian Bayi (mortalitas)	51	49
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan	9	9
3. Angka Kematian Balita	12	11
4. Prevalensi Gizi Buruk	1,09%	0,7 %
5. Bidan Desa	5	13

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.20
Keikutsertaan dalam Program KB
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 - 2010

TAHUN	IKUT KB	TIDAK KB	JUMLAH
2009	21.053	5.412	26.465
2010	26.170	2.450	28.575

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Bone Bolango

Tabel 1.21
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peserta KB Baru
dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 - 2010

TAHUN	Peserta KB Baru
-------	-----------------



	IUD	PIL	KDM	OV	OPR	STK	IMPL	Jumlah	%
2009	568	1.478	210	-	25	3.111	941	6.333	131,86
2010	868	2.651	1.076	-	70	3.265	2.469	10.399	162,28

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bone Bolango

❖ Ketenagakerjaan

Pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang menempatkan penduduk pada peranan yang sangat penting baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan.

Agar program pembangunan yang dilaksanakan itu dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal perlu didukung oleh tersedianya informasi yang lengkap tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango yang sangat penting sebagai dasar dalam menentukan perencanaan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk 10 tahun keatas yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan pada saat pencacahan. United nation mendefinisikan angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai penduduk yang memproduksi barang dan jasa secara ekonomi, yang mencakup mereka yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja. Berikut ini gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2009 sampai dengan 2010

Tabel 1.22
Kondisi Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

No	Uraian	T A H U N	
		2009	2010
1.	Jumlah Angkatan Kerja (15-60 Tahun)	79.334	801
2.	Jumlah Penduduk Bekerja	74.732	306
3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	3.064	1.634
4.	Jumlah Pencari Kerja	4.491	1.634
5.	Pencari Kerja yang Terdaftar	-	801
6.	Rata-rata upah minimum (Rp,-)	700.000	762.500

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango

➤ Sosial Lainnya

Pembangunan dibidang sosial lainnya di Kabupaten Bone Bolango diarahkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial, material dan spiritual, utamanya untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, keterlantaran, kerawanan sosial dan bencana alam. Disamping itu berupaya



menciptakan nuansa yang dapat menggairahkan kehidupan sosial, berwawasan luas, positif melalui pendidikan non formal, keterampilan serta penyediaan sarana hiburan.

Sedangkan kondisi dari jumlah sarana sosial di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada tabel 1.24 berikut ini.

Tabel 1.23
Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan
Jumlah Komunitas Adat Terpencil
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KK)
2009	600 KK	460
2010	-	125

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango

b. Potensi Unggulan Daerah

➤ Pengembangan Usaha Pertanian

Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.28 berikut ini :

Tabel 1.24
Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 –2010

No	Penggunaan Lahan (Tanah)	LUAS (Ha)	
		2009	2010
1.	Sawah yang diolah :		
	a. Sawah Teririgasi	1897	1897
	b. Sawah Tadah Hujan	38,5	38,5
	c. Sawah Pasang Surut	-	-
	d. Sawah Lainnya/Irigasi Desa	111	111
2.	Sawah yang belum diolah	-	-
3.	Kebun	12396	12361
4.	Ladang/Huma	6.345	6.444
5.	Pekarangan tanah untuk bangunan halaman sekitar	6897	7.842
6.	Pengembalaan Padang rumput	2936	2936
7.	Rawa-rawa yang tdk di tanam	4	4
8.	Tambak	-	-
9.	Kolam/lobak/Empang	70	70



10.	Lahan Kering sementara tidak diusahakan	7,092	6.448
11.	Tanaman Kayu-kayuan	7.938	6.477
12.	Hutan Negara	60.939	61.373
13.	Perkebunan	15.760	15.758
14.	Lainnya	28.101	28.101

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

Potensi pada sektor pertanian dan tanaman pangan terdiri dari beberapa komoditas yaitu padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk selanjutnya data potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.25, Tabel 1.26, Tabel 1.27 dan Tabel 1.28 berikut ini.

Tabel 1.25
Data Perkembangan Tanaman Pangan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009– 2010

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010
1	Padi		
	Luas Tanam (Ha)	4,880	4,353
	Luas Panen (Ha)	3.626	3,780
	Produktivitas (Ton/Ha)	6.5	5.2
	Produksi (Ton)	23.569	19,656
2	Jagung		
	Luas Tanam (Ha)	3.839	4,268
	Luas Panen (Ha)	3,487	3,513
	Produktivitas (Ton/Ha)	5.0	5.2
	Produksi (Ton)	17,434	18,267
3	Kacang Tanah		
	Luas Tanam (Ha)	242	138
	Luas Panen (Ha)	243	191
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	1
	Produksi (Ton)	243	191
4	Kacang Hijau		
	Luas Tanam (Ha)	20	11
	Luas Panen (Ha)	14	16
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,95	0,95
	Produksi (Ton)	13,3	15,2
5	Kacang Kedelai		
	Luas Tanam (Ha)	8	-
	Luas Panen (Ha)	37	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	-



	Produksi (Ton)	37	-
6	Ubi Jalar		
	Luas Tanam (Ha)	120	114
	Luas Panen (Ha)	101	130
	Produktivitas (Ton/Ha)	7	7
	Produksi (Ton)	707	910
7	Ubi Kayu		
	Luas Tanam (Ha)	164	9
	Luas Panen (Ha)	140	17
	Produktivitas (Ton/Ha)	8	7
	Produksi (Ton)	1,120	135

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

Tabel 1.26
Data Perkembangan Tanaman Holtikultura
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010
1	Bawang Merah		
	Luas Tanam (Ha)	6	N/A
	Luas Panen (Ha)	7	1
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	1
	Produksi (Ton)	4,20	1
2	Bawang Daun		
	Luas Tanam (Ha)	N/A	N/A
	Luas Panen (Ha)	N/A	N/A
	Produktivitas (Ton/Ha)	N/A	N/A
	Produksi (Ton)	N/A	N/A
3	Petsai/Sawi		
	Luas Tanam (Ha)	5	N/A
	Luas Panen (Ha)	5	N/A
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,50	N/A
	Produksi (Ton)	7,5	N/A
4	Cabe Rawit		
	Luas Tanam (Ha)	42	138
	Luas Panen (Ha)	14	373
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30
	Produksi (Ton)	420	11190



5	Tomat		
	Luas Tanam (Ha)	26	72
	Luas Panen (Ha)	15	61
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,20	100
	Produksi (Ton)	18	6100
6	Terong		
	Luas Tanam (Ha)	27	N/A
	Luas Panen (Ha)	18	N/A
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	N/A
	Produksi (Ton)	18	N/A
7	Ketimun		
	Luas Tanam (Ha)	52	44
	Luas Panen (Ha)	46	30
	Produktivitas (Ton/Ha)	100	100
	Produksi (Ton)	46	50
8	Kangkung		
	Luas Tanam (Ha)	32	21
	Luas Panen (Ha)	19	20
	Produktivitas (Ton/Ha)	100	100
	Produksi (Ton)	19	200
9	Bayam		
	Luas Tanam (Ha)	32	21
	Luas Panen (Ha)	19	32
	Produktivitas (Ton/Ha)	10	10
	Produksi (Ton)	19	320
10	Kacang Panjang		
	Luas Tanam (Ha)	42	47
	Luas Panen (Ha)	14	69
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30
	Produksi (Ton)	42	2070

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

Tabel 1.27
Data Perkembangan Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010
1	Kelapa		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1,205	1.259
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	5,312,8	5312,79
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	774,23	774,23
	Produksi (Ton)	7,438	7438
2	Kakao		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1169,95	351



	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	830	1,384
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	219,57	599,52
	Produksi (Ton)	166	277
3	Kemiri		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	369	363
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	660	666,01
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-
	Produksi (Ton)	330	333
4	Jambu		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	198	198
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	542	542
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-
	Produksi (Ton)	740	740,4
5	Kapuk		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	81	91
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	246	248
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-
	Produksi (Ton)	165	124
6	Pala		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	27	67
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	29	39
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-
	Produksi (Ton)	6	8
7	Cengkeh		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	313	119
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	892	1,191
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	270	226
	Produksi (Ton)	446	592
8	Kopi		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	76	82
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	315	333,88
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	65	70,05
	Produksi (Ton)	79	100
9	Aren		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	171	274,3
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	330	337
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-
	Produksi (Ton)	165	169
10	Vanili		
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	N/A	N/A
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	N/A	N/A
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	N/A	N/A
	Produksi (Ton)	N/A	N/A
11	Kayu Manis		



	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	N/A	N/A
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	N/A	N/A
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	N/A	N/A
	Produksi (Ton)	N/A	N/A

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.28
Data Perkembangan Tanaman Buah-buahan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010*
1	Alpoket		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	428	428
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	266	266
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20
	Produksi (Ton)	53,2	53,2
2	Belimbing		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	464	464
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	451	451
	Produktivitas (Ton/Ha)	15	15
	Produksi (Ton)	67,65	67,65
3	Duku/Langsat		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	8.325	8.325
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	3.505	3.505
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20
	Produksi (Ton)	701	701
4	Durian		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	21.279	21.279
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	6.590	6.590
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20
	Produksi (Ton)	1.318	1.318
5	Jambu Biji		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	1.456	1.456
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	995	995
	Produktivitas (Ton/Ha)	50	50
	Produksi (Ton)	497,5	497,5
6	Jambu Air		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	720	720
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	463	463
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30
	Produksi (Ton)	285	285
7	Jeruk Siam/Kepron		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	1.417	1.417
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	531	531
	Produktivitas (Ton/Ha)	35	35



	Produksi (Ton)	185,85	185,85
8	Jeruk Besar		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	125	125
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	55	55
	Produktivitas (Ton/Ha)	35	35
	Produksi (Ton)	19.25	19.25
9	Mangga		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	42.272	42.272
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	22.100	22.100
	Produktivitas (Ton/Ha)	13	13
	Produksi (Ton)	2.873	2.873
10	Nangka		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	6.219	6.219
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	4.668	4.668
	Produktivitas (Ton/Ha)	45	45
	Produksi (Ton)	2.100,6	2.100,6
11	Nenas		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	7.780	7.780
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	4.950	4.950
	Produktivitas (Ton/Ha)	2	2
	Produksi (Ton)	99	99
12	Pepaya		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	4.953	4.953
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	3.550	3.550
	Produktivitas (Ton/Ha)	45	45
	Produksi (Ton)	1.597,5	1.597,5
13	Pisang		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	68.078	68.078
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	35.513	35.513
	Produktivitas (Ton/Ha)	10	10
	Produksi (Ton)	3.553,1	3.553,1
14	Rambutan		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	487	487
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	65	65
	Produktivitas (Ton/Ha)	60	60
	Produksi (Ton)	39	39
15	Salak		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	-	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	-	-
	Produksi (Ton)	-	-
16	Sawo		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	-	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-



	Produktivitas (Ton/Ha)	-	-
	Produksi (Ton)	-	-
17	Sirsak		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	919	919
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	737	737
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20
	Produksi (Ton)	147,4	147,4
18	Sukun		
	Jumlah Tanaman (Pohon)	414	414
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	155	155
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30
	Produksi (Ton)	46,5	46,5

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
*data sementara 2010

Salah satu faktor pendukung dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian adalah ketersediaan sarana irigasi dan alat-alat pertanian. Daerah irigasi yang mengalir wilayah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari daerah irigasi alale dan daerah irigasi lomaya yang luas dan fungsi/teknisnya sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.29 sedangkan untuk ketersediaan alat-alat pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.30.

Tabel 1.29
Potensi dan Fungsi (Teknis) Daerah Irigasi
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

No.	Daerah Irigasi	Potensi dan Fungsi Per-Tahun	
		2009	2010
1	Daerah Irigasi Alale		
	a. Potensi (Ha)	674,1	674,1
	b. Fungsi/Teknis (Ha)	674,1	674,1
2	Daerah Irigasi Lomaya		
	a. Potensi (Ha)	1,261,68	1,261,68
	b. Fungsi/Teknis (Ha)	1,261,68	1,261,68

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.30
Data Jumlah Alat-Alat Pertanian
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

No.	Jenis Alat	TAHUN	
		2009	2010
1.	Traktor Roda Dua	38	38
2.	Traktor Mini	-	-
3.	Traktor Sedang	8	8
4.	Traktor Besar	2	2
5.	Pengering Padi	-	-



6.	Pembersih Gabah	2	2
7.	Penyosoh Beras	-	-
8.	Penggilingan Padi	40	40

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango

Penyuluh sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian di lapangan, sangat memegang peranan penting dalam menyampaikan, menyelaraskan dan mensukseskan program dan kegiatan sektor pertanian sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.31.

Tabel 1.31
Jumlah BP3K, Tenaga Penyuluh dan Kelompok Petani
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

TAHUN	Jumlah BP3K	Jumlah Tenaga Penyuluh	Jumlah Kelompok Petani
2009	6 Unit	109	549
2010	1 Unit	123	491

Sumber Data : BP4K Kabupaten Bone Bolango

➤ Pengembangan Perikanan

Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung, dan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan tangkap pada tahun 2009 sebesar 11.250 ton dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 11.830 ton Tabel 1.32, sedangkan data produksi peralatan tangkap dapat dilihat pada Tabel 1.33.

Tabel 1.32
Data Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

No	Tahun	Jumlah Produksi (ton)
1	2009	11.250
2	2010	11.830

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.33
Data Produksi Peralatan Tangkap (dalam ton)
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009- 2010

NO	Jenis Peralatan Tangkap	2009	2010
1.	Pukat Cincin	3.356,2	3853,7



2.	Jaring Insang Tetap	47.4	50
3.	Sekor	-	-
4.	Pancing Ulur	4.547,8	4,883,2
5.	Pancing Tegak	1.134,2	1,090,7

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Untuk produksi perikanan laut yang dijual di TPI terdiri dari beberapa jenis ikan, antara lain ikan layang, bawal, kembung, selar, tembang dan lain-lain. Untuk ikan layang, pada tahun 2009 produksinya mencapai 1.880,7 kg dan meningkat pada tahun 2010 mencapai 2.132,8 kg. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1.34.

Tabel 1.34
Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

No	Jenis Ikan	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)
1.	Layang	1.880,7	10,155,780	2,132,8	11,611,214
2.	Selar	1.738,7	9,388,980	1,888,6	10,286,474
3.	Tongkol	1.458,2	7,291,000	1.503,7	7,518,450
4.	Cakalang	1.143,7	8,005,900	1.503,2	10,522,675
5.	Tenggiri	215,6	1,509,200	244,2	1,709,157
6.	Ikan Terbang	15,5	46,500	16,1	48,109
7.	Julung-julung	16,2	50,200	16,9	50,876
8.	Ikan Kuwe	625,5	5,004,000	732,2	5,859,967
9.	Cumi-cumi	-	80,000	1.952,5	15,620,031
10.	Tuna	259,4	518,800	289,3	5,785,655
11.	Lainnya (Madidihang)	847,0	1,694,000	801,6	14,852,713

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Salah satu faktor pendukung dalam peningkatan produksi perikanan tangkap adalah ketersediaan alat-alat tangkap, seperti pukat cincin, jaring insang hanyut, jaring lingkaran dan lain-lain. Ketersediaan alat-alat tangkap dari tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.35.

Tabel 1.35
Data Sarana Alat Tangkap di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010



NO	Produksi dan Jenis Alat Tangkap	2009	2010*
1.	Pukat Pantai (Buah)	1	N/A
2.	Pukat Cincin (Buah)	18	N/A
3.	Jaring Insang Hanyut (Buah)	-	N/A
4.	Bagan Perahu/Rakit (Buah)	-	N/A
5.	Jaring Insang Tetap (Buah)	-	N/A
6.	Jaring Angkat Lainnya (Buah)	-	N/A
7.	Pancing lainnya (buah)	2005	N/A
8.	Pancing Tonda (Buah)	1685	N/A
9.	Sero (buah)	148	N/A
10.	Pancing Tegak	1.272	N/A

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

*Data 2010 masih dalam pengolahan

Kabupaten Bone Bolango memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone, yang menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Oleh karena itu banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, tinggal dan hidup di sepanjang pesisir pantai tersebut. Kondisi jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan yang ada di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.36, dan Tabel 1.37.

Tabel 1.36
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut
Berdasarkan Kepemilikan Sarana Penangkap Ikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

NO	Jenis Rumah Tangga Perikanan Laut (RTP)	2009	2010
1.	RTP Tanpa Perahu	-	-
2.	RTP Perahu Tanpa Motor	388	387
3.	RTP Perahu/Motor Tempel	1,278	1,285
4.	RTP Kapal Motor	7	8

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.37
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Darat
Berdasarkan Kepemilikan Sarana Penangkap Ikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

Tahun	Rumah Tangga Perikanan (RTP)					
	RTP Tambak	RTP Kolam	RTP Keramba	RTP Mina Padi	RTP Rumput Laut	RTP Pembenhian
2009		517	65	35	-	-
2010		528	60	38	-	46

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango



Jika dilihat dari keberadaan Rumah Tangga Perikanan Darat yang ada di Kabupaten Bone Bolango, ternyata mengalami Kenaikan. Pada tahun 2009, masih ada 617 RTP untuk tahun 2010 menjadi 672 RTP.

➤ **Pengembangan Usaha Peternakan**

Peternakan besar yang banyak diusahakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Bone Bolango meliputi sapi potong, kuda, dan kambing. Khusus untuk ternak sapi potong, jenis sapi yang banyak diusahakan di daerah ini adalah jenis sapi bali Tabel 1.38.

Tabel 1.38
Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Besar
di Kabupaten Bone Bolango 2009 – 2010

Tahun	Jumlah (Ekor)		
	Sapi	Kuda	Kambing
2009	14.519	774	5509
2010	N/A	N/A	N/A

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango
*Data 2010 masih dalam pengolahan

Tabel 1.39
Jumlah Ternak Unggas
di Kabupaten Bone Bolango 2009 – 2010

Jumlah Ternak Besar	Tahun (ekor)	
	2009	2010
1. Ayam Kampung		
• Jantan	67,461	22,290
• Betina	199,984	44,663
2. Ayam Ras		
• Jantan	-	50,115
• Betina	776,645	100,230
3. Itik		
• Jantan	5,992	8,212
• Betina	8,447	9,883

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.40
Konsumsi Ternak di Kabupaten Bone Bolango
2009 – 2010

Tahun	Konsumsi Per-Tahun		
	Daging	Telur	Susu
2009	3,273,140	480,995	-
2010	6,178,330	614,340	-

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango



Tabel 1.41
Jumlah Ternak sapi yang dipotong di RPH dan diluar RPH
yang dilaporkan
di Kabupaten Bone Bolango 2009 – 2010

No	Tahun	Jumlah Ternak Sapi yang dipotong (ekor)
1	2009	982
2	2010	993

➤ **Pengembangan Sektor Kehutanan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi. Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain. Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.42 dan Tabel 1.43.

Tabel 1.42
Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2010

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)	
		2009	2010
1	Hutan Lindung	20.898	15.718,25
3	Hutan Produksi Terbatas	8.913	18.803,29
4	Hutan Produksi Tetap	3470	836,45
5	Hutan Produksi Konversi	-	-
6	Hutan Taman Nasional	110.000	104.740,15

Sumber Data : BPKH Wil XVI Gorontalo, (SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)

Tabel 1.43
Produksi Hasil Hutan Non HPH di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2010



Produksi Hasil Hutan	Satuan	Tahun	
		2009	2010
1. Kayu Bulat	M ³	432,28	432,28
2. Kayu Gergajian	M ³	584,87	584,87
3. Kayu Olahan	-	-	-
4. Hasil Hutan Ikutan	-	-	-
5. Damar	-	-	-
6. Rotan	TON	257,098	257,098
7. Gondorukem	-	-	-
8. Kayu Jati	-	-	-
9. Terpentin	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data Dinas Kehutanan Tahun 2009 menurut luas dan penyebarannya sebesar 41,346 Ha, tahun 2010 bertambah menjadi 105,666 Ha Tabel 1.44.

Tabel 1.44
Luas Lahan Kritis, Reboisasi dan Penghijauan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 s/d 2010

No.	Jenis Lahan	Luas lahan per tahun (Ha)	
		2009	2010
1.	Lahan Kritis	41,346	105,666
2.	Lahan Reboisasi	100	-
3.	Lahan Penghijauan	-	287
4.	Kebakaran Hutan	19,8	2,40

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango

➤ **Pengembangan Sektor Pertambangan Energi**

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan dimana masih seringnya terjadi penggunaan bahan-bahan radioaktif yang tidak direkomendasikan dalam usaha pertambangan rakyat. Untuk itu diperlukan kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan pemberian izin pengolahan hasil pertambangan dengan mempertimbangkan nilai hayati serta potensi yang tersedia. Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.45 dan Tabel 1.46 berikut ini.



Tabel 1.45
Potensi Pertambangan Non Logam
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 s/d 2010

No	Jenis Tambang	Potensi Pertambangan Non Logam	
		2009	2010
1.	Granit (Ton)		
2.	Andesit (Ton)	62.500.000	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	25.000.000	25.000.000

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.46
Potensi Pertambangan Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
1.	Emas	Kec. Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3.375
		Kec. Suwawa Timur Desa Tulabolo	14
		Kec. Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	171.40
		Kec. Suwawa Timur Sungai Mak	39.56
		Kec. Suwawa Timur Motomboto	4.50
		Kec. Suwawa Timur Kayubulan	10.56
2.	Tembaga	Kec. Suwawa Tengah Desa Tapadaa	90.000
		Kec. Suwawa Timur Desa Kayubulan	192.000
		Kec. Suwawa Timur Motomboto	80.000
		Kec. Suwawa Timur Sungai Mak	880.000
		Kec. Bonepantai Cabang Kiri	1.239.000



Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.47

Tabel 1.47
Perkembangan Potensi Sumber Energi
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Sumber Daya Energi	Lokasi (Kec./Desa)	Jumlah Sumber Daya Energi (unit)
1.	PLTA	Suwawa Timur	1
2.	PLTU	Kec. Kabila Bone	1
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	2
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kec. Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kec. Suwawa Selatan - Desa Molintogupo Kec. Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kec. Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kec. Tilongkabila - Desa Tunggulo Kec. Bulango Ulu Kec. Bone Pantai -Desa Pelita Hijau	100 Unit 145 Unit 425 Unit 71 Unit 1 Unit 71 Unit 50 Unit 50 Unit 47 Unit 100 Unit
6.	PLTMH	Kec. Bulango Ulu - Desa Owata Kec. Bulango Timur - Desa Kopi Kec. Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit 1 Unit 15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

➤ **Pengembangan Sektor Pariwisata**

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek – obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.49.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan di lapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah pantai selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk



pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Tabel 1.48
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata				Jumlah Sanggar Seni dan Budaya
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah	
2009	1	1	1	3	6
2010	1	1	3	3	6

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

Adapun perkembangan jumlah kunjungan wisata pada setiap obyek wisata di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.49 berikut ini:

Tabel 1.49
Jumlah Kunjungan Wisatawan
pada Setiap Obyek Wisata
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2010

No	Jenis Obyek Wisata	Lokasi (Kec. & Desa)	Jumlah Kunjungan Per-Tahun Kunjungan	
			2009	2010
1.	Wisata Alam Lombongo	Kec. Suwawa Desa Lombongo	1.770	3562
2.	Wisata Bahari Olele	Kec. Kabila Bone Desa Olele	N/A	N/A
3.	Wisata Budaya Makam Raja	Desa Dunggala Kec. Tapa	N/A	N/A



	Atinggola			
4.	Kebun Binatang Mana Suka	Kec. Tilongkabila Desa Lonuo	N/A	N/A

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.50
Jenis dan Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya
di Kab. Bone Bolango dari Tahun 2006 s/d 2010

No	Jenis Pagelaran Seni dan Budaya	Lokasi (Kec. & Desa)	Tahun Kunjungan				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Festival Tumbilatohe	Kabupaten Bone Bolango	1	1	1	1	1
2	Festival Nou dan Uti	Kabupaten Bone Bolango	1	1	1	1	1
3	Lainnya	Kabupaten Bone Bolango	2	2	2	2	2

c. *Pertumbuhan Ekonomi / PDRB*

➤ **Kondisi Struktur Perekonomian Daerah**

Dari sisi ekonomi makro daerah terdapat beberapa indikator utama yang sering dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi daerah yaitu: ***pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan perkapita, inflasi, investasi (penanaman modal), dan keuangan daerah***. Sedangkan indikator makro lainnya yang juga sering digunakan dalam perencanaan dan analisis perekonomian daerah adalah indikator moneter, perbankan, ekspor, impor, dan kemiskinan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Struktur perekonomian Bone Bolango didominasi oleh tiga sektor utama Tabel 1.51, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 1.51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha



Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2009 (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)	
		2008	2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	290,984	349,473
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,983	6,746
3.	Industri Pengolahan	95,055	103,262
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,773	2,873
5.	Bangunan	34,404	45,958
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	96,460	111,291
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	29,427	43,722
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	76,485	82,28
9.	Jasa-Jasa	87,817	103.633
PDRB		717,387	849,263
S u PDRB TANPA MIGAS		717,387	849,263

Sumber Data : Kantor BPS Kabupaten Bone Bolango
*Data 2010 masih dalam proses pengolahan

Tabel 1.52
Distribusi Persentasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008- 2009

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)	
		2008	2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	40,56	41,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,79
3.	Industri Pengolahan	13,25	12.16
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,39	0,34
5.	Bangunan	4,80	5,41
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,45	13,10
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,10	5,15
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,66	9,68
9.	Jasa-Jasa	12,24	12,21
PDRB		100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS		100.00	100.00

Sumber Data : Kantor BPS Kabupaten Bone Bolango
*Data 2010 masih dalam proses pengolahan

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dari tahun 2009-2010 didominasi oleh tiga sektor utama (Tabel 1.53), yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; listrik, gas dan air bersih; dan 5xsktor pertambangan dan penggalian.

Tabel 1.53
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



**Kabupaten Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha
Atas dasar harga Konstan 2000
Tahun 2008 -2009 (Jutaan Rupiah)**

No.	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi Per-Tahun	
		2008	2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	75,286	85.607
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,203	3.364
3.	Industri Pengolahan	34,399	35.589
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.023	1.054
5.	Bangunan	20,093	21.020
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	25,495	26.022
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	22,747	23,342
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	34,988	37.726
9.	Jasa-Jasa	29,787	30.305
PDRB		247,031	264,028
PDRB TANPA MIGAS		247,031	264,028

**Data 2010 masih dalam proses pengolahan*

**Tabel 1.54
LAJU PERTUMBUHAN PDRB BONE BOLANGO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 - 2009**

No.	Sektor	Tahun	
		2008	2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6,34	13,71
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,23	5,03
3.	Industri Pengolahan	2,85	3,46
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,74	3,00
5.	Bangunan	3,75	4.61
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,74	2.07
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,91	2.62
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,21	7,79
9.	Jasa-Jasa	3,83	1,74
PDRB		6,34	6,88
PDRB TANPA MIGAS		6,34	6,88

**Data 2010 masih dalam proses pengolahan*

**Tabel 1.55
BEBERAPA AGREGAT
PDRB KABUPATEN BONE BOLANGO ATAS DASAR HARGA
BERLAKU TAHUN 2008-2009**

No.	Rincian	Tahun	
		2008	2009
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah)	717,387	849,263
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	130,025	131,797
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	5,517,304	6,443,717

**Data 2010 masih dalam proses pengolahan*

Tabel 1.56



**BEBERAPA AGREGAT
PDRB KABUPATEN BONE BOLANGO ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2009**

No.	Rincian	Tahun	
		2008	2009
1.	PDRB atas dasar harga Konstan (Jutaan Rupiah)	247,031	264,028
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	130,025	131,797
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	1,899,875	2,003,292

*Data 2010 masih dalam proses pengolahan

**BAB II
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Oleh sebab itu kemampuan dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada setiap daerah akan merupakan faktor kunci sukses dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang harus berbenah diri guna penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut dan juga tuntutan perkembangan saat ini. Ada beberapa tuntutan masyarakat yang mengemuka antara lain :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Terwujudnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini;
3. Mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional.
4. Kemampuan merumuskan pilihan berdasarkan prioritas, tujuan (alternatif) dan sasaran, menemukan kendali permasalahan dan merumuskan tujuan serta menetapkan sasaran secara tepat dalam mengembangkannya.



Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan serta perumusan prioritas daerah.

A. Visi dan Misi

Keinginan untuk menghadirkan pemerintahan Daerah yang bersih, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum demi terciptanya masyarakat sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial adalah sebuah proses yang akan selalu berkelanjutan. Dengan berdasarkan pada permasalahan dasar yang dihadapi oleh pembangunan pada masa-masa sebelumnya dan visi yang hendak dicapai maka dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Konsep perencanaan pembangunan yang baik adalah apabila konsep dimaksud dilandasi oleh visi yang jelas, terukur dan terarah atau fokus. Visi erat kaitannya dengan cara pandang ke depan kemana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hendak “dibawa” dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, produktif, *clear (bersih)*, *clean (tuntas)* dan terukur. Visi menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Rumusan visi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone Bolango adalah:

“ Terwujudnya Bone Bolango Bukan sebagai Kota Ujung ”

Visi Bone Bolango “bukan sebagai kota ujung” adalah pernyataan yang bersifat penegasan untuk menjadikan Bone Bolango sebagai daerah yang “terbuka”, dinamis, dan adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang menuju pada peningkatan taraf hidup masyarakat.



Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibuatlah misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan struktur kelembagaan pemerintahan daerah dan perangkatnya serta fasilitas penunjang operasional kelembagaan.
2. Mengimplementasikan sistem demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel dan berwibawa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan daerah yang aspiratif, normatif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan program pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisa kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Melaksanakan program-program unggulan Kabupaten Bone Bolango yakni :
 - a. Pengembangan Usaha Pertanian
 - b. Pembangunan Perikanan
 - c. Pengembangan usaha Peternakan, dan
 - d. Pengembangan sektor Pariwisata.
5. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan, menuju wilayah terpencil dan kawasan produktif serta pengembangan jaringan telekomunikasi.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan langkah yang dianggap penting untuk dilakukan adalah menetapkan strategi pembangunan dimana strategi dimaksud merupakan prinsip dasar rencana aksi yang dituangkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2010.

Untuk memperoleh rumusan strategi pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah, maka ditetapkan model pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.1 **Rumusan Strategi Pembangunan Kabupaten** **Bone Bolango Berdasarkan Analisis SWOT** **(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)**



<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Pemda untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)2. Keamanan dan kenyamanan masyarakat serta kestabilan politik daerah karena kesetiaan masyarakat Bone Bolango kepada NKRI.3. Potensi sumber daya alam untuk menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.4. Moralitas tinggi serta kegigihan dan semangat patriotisme sebagai daerah kelahiran pejuang nasional menjadikan suatu motivasi dalam membangun daerah.	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang belum optimal dan ramah lingkungan.2. Rendahnya kualitas SDM dan aparatur daerah.3. Terbatasnya infrastruktur.4. Kerawanan sosial yang dapat disebabkan karena tingginya suhu politik.
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri (otonomi daerah).2. Adanya kerjasama antardaerah dengan provinsi dan kabupaten/kota3. Adanya penerapan perdagangan bebas regional dan global.4. Adanya kemajuan teknologi dan informasi.	<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundang-undangan yang terus berubah2. Persaingan regional dan global yang semakin ketat.3. Keterbatasan anggaran pembangunan dari pusat.4. Minimnya investasi baik PMA maupun PMDN.

Berdasarkan analisis di atas, maka **FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN** yang menjadi **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH** adalah sebagai berikut :

1. **STRATEGI PENATAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH BONE BOLANGO** yang diarahkan untuk penataan sistem pemerintahan daerah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam, peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam tatanan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. **STRATEGI MEMBANGUN BONE BOLANGO MENUJU MASYARAKAT AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA**, yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pengembangan



dan peningkatan program infrastruktur dalam rangka menjadikan Bone Bolango sebagai daerah penunjang (buffer area) Provinsi Gorontalo.

Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tangguh sehingga membentuk lembaga dan aparat daerah yang tahan menghadapi berbagai perubahan sebagai suatu sistem yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem pemerintahan yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Strategi ini juga untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang good governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada pembebanan berlebih pada pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Tata pemerintahan yang baik merupakan mekanisme interaksi berbagai pihak terkait dalam institusi pemerintahan baik secara individu maupun kelompok untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan manajemen pembangunan. Tata pemerintahan yang baik merupakan wujud bentuk kepatuhan untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik secara konsisten dalam berbagai pola pikir dan pola tindak menyelenggarakan roda pemerintahan. Implementasi pelaksanaan 10 prinsip good governance saat ini di Kabupaten Bone Bolango telah berjalan sesuai mekanisme, meskipun belum menyentuh pada semua level-level pemerintahan.

Strategi kedua, Strategi membangun Bone Bolango menuju masyarakat aman, damai dan sejahtera, pada dasarnya diarahkan untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh yang didasarkan pada peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat dimaksudkan disini adalah kebutuhan untuk hidup lebih layak dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: (1) Kebutuhan akan pekerjaan yang layak; (2) Kebutuhan untuk memperoleh perlindungan dan persamaan hukum serta rasa aman; (3) Kebutuhan untuk memperoleh akses atas sandang, pangan, dan papan yang terjangkau; (4) Kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak; dan (5) Kebutuhan untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

Bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terutama di bidang ekonomi memerlukan kemampuan sumber pendanaan dan arah kebijakan yang tepat, maka diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kualitas pemerataan dan pemenuhan hak dasar dan bukan hanya terpaku kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, maka



diharapkan penataan struktur ekonomi perlahan-lahan dapat dilaksanakan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimal.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah diperlukan landasan yang kokoh. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan maupun perundang-undangan yang tidak berubah-ubah; serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga negara yang meningkat.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) **AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010**, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah.

Agenda utama berikut sasaran dan strateginya akan diuraikan secara detail berikut ini :

AGENDA 1:

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Sasaran 1.1:

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga/instansi pemerintah.

Strategi 1.1.1.

Pemantapan struktur, manajemen dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 1.1.1.1 Menuntaskan penanggulangan penyalagunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN;
- 1.1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi;
- 1.1.1.3 Menciptakan fungsi lembaga/instansi daerah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Strategi 1.1.2.

Peningkatan sumber daya aparatur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 1.1.2.1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas aparatur daerah;



- 1.1.2.2. Menciptakan keamanan aparaturnya dalam mengantisipasi segala permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 1.1.2.3. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial masyarakat untuk memperkuat wawasan kedaerahan;
- 1.1.2.4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Strategi 1.1.3.

Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 1.1.3.1. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan yang mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

AGENDA 2:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Sasaran 2.1:

Penciptaan pelayanan prima terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Strategi 2.1.1.

Penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.1.1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin yang meliputi kebutuhan akan kesempatan kerja, kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi penuh dalam perumusan kebijakan publik.

Strategi 2.1.2.

Peningkatan mutu dan kreatifitas pendidikan berbasis kawasan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.2.1 Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan yang berbasis pada kompetensi dan kawasan berdasarkan potensi sumber daya alam pada masing-masing wilayah, peningkatan pemerataan untuk mendapatkan pendidikan, peningkatan efisiensi dan relevansi pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.



Strategi 2.1.3.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.3.1 Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.

Strategi 2.1.4.

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya, sertaantisipasi pengembangan jaringan koordinasi penanggulangan bencana alam terpadu.

Strategi 2.1.5.

Peningkatan potensi budaya daerah dan kualitas kehidupan beragama, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.5.1 Pengembangan dan pelestarian potensi budaya daerah, peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Strategi 2.1.6.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 2.1.6.1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan: (a) menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,79 persen; tingkat fertilitas (TFR) menjadi 1,9 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (*unmetneed*) menjadi 9,17 persen; (b) meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 0,3 persen; pemakaian alat kontrasepsi yang efektif dan efisien; usia perkawinan pertama menjadi 20 tahun; (c) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (d) meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
- 2.1.6.2. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi



dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah;

- 2.1.6.3. Menerapkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2.1.6.4. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
- 2.1.6.5. Meningkatkan kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga;
- 2.1.6.6. Pengembangan olahraga tradisional; dan
- 2.1.6.7. Tersedianya sarana dan prasarana aktivitas pemuda dan olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

AGENDA 3:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sasaran 3.1:

Penataan struktur dan infrastruktur ekonomi daerah.

Strategi 3.1.1.

Peningkatan usaha pertanian dan perkebunan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.1.1. Melakukan pengembangan tanaman pangan;
- 3.1.1.2. Diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan;
- 3.1.1.4. Peningkatan kualitas SDM pertanian;
- 3.1.1.5. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani; dan
- 3.1.1.6. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan keunggulan komperatif dan kompetitif wilayah terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis serta penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Strategi 3.1.2.

Pengembangan usaha peternakan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.2.1. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak;
- 3.1.2.2. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM petani ternak;



- 3.1.2.3. Pengembangan usaha peternakan dengan pendekatan keunggulan komperatif dan kompetitif pada setiap wilayah terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis;
- 3.1.2.4. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk peternakan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pengolahan hasil peternakan; dan
- 3.1.2.5. Peningkatan standar mutu komoditas peternakan serta penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha.

Strategi 3.1.3.

Pengembangan usaha dan sarana prasarana perikanan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.3.1 Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan, nelayan, dan pembudidaya ikan;
- 3.1.3.2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga perdesaan untuk meningkatkan akses nelayan terhadap sarana produktif, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar nelayan;
- 3.1.3.3. Pengembangan pola penangkapan ikan yang berbasis kelestarian sumberdaya ikan, sebagai jaminan stok masa depan, dimana seberapa banyak ikan yang ditangkap tanpa mengganggu potensi pembaharuan stok (kapasitas reproduksi) sehingga tidak merusak potensi perikanan masa depan;
- 3.1.3.4. Meningkatkan ketersediaan pangan ikan;
- 3.1.3.5. Penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya;
- 3.1.3.6. Penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
- 3.1.3.7. Perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;
- 3.1.3.8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- 3.1.3.9. Peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen;
- 3.1.3.10. Percepatan peningkatan produk perikanan budidaya;
- 3.1.3.11. Peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan;
- 3.1.3.12. Perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada;



- 3.1.3.13. Pemantapan penyusunan rencana dan kebijakan di sektor perikanan dengan mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dan terintegrasi sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing produk perikanan;
- 3.1.3.14. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut dan pesisir secara lestari berbasis masyarakat;
- 3.1.3.15. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat;
- 3.1.3.16. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria; dan
- 3.1.3.17. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, dan perairan tawar (danau, situ, perairan umum).

Strategi 3.1.4.

Peningkatan potensi kepariwisataan daerah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.4.1. Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang mendukung pengembangan wisata termasuk wisata bahari;
- 3.1.4.2. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata serta pembukaan objek wisata baru, terutama wisata bahari disamping wisata alam maupun wisata budaya lainnya;
- 3.1.4.3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan promosi pariwisata daerah serta optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata; dan
- 3.1.4.4. Penambahan sarana infrastruktur penunjang pariwisata dan penyediaan fasilitas jasa dan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan pariwisata.

Strategi 3.1.5.

Peningkatan kapasitas koperasi, industri kecil dan menengah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.5.1. Memperkuat kelembagaan koperasi yang diupayakan dengan membenah penataan kelembagaan dan organisasi serta manajemen koperasi;
- 3.1.5.2. Penciptaan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif untuk kemajuan koperasi;
- 3.1.5.3. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat;



- 3.1.5.4. Mengupayakan agar Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk dapat berperan dalam proses industrialisasi dengan penggunaan teknologi serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Strategi 3.1.6.

Perluasan kesempatan kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.6.1 Menciptakan lapangan pekerjaan, diharapkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya maka akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- 3.1.6.2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dapat handal diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dapat bersaing dalam menciptakan dan mencari lapangan pekerjaan; dan
- 3.1.6.3. Memperbaharui program perluasan kesempatan kerja yang antara lain dengan invesatsi, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.

Strategi 3.1.7.

Pengembangan investasi daerah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.7.1 Meningkatkan promosi potensi daerah baik produk unggulan daerah berupa hasil pertanian maupun kelautan juga produk-produk wisata yang salah satunya adalah wisata taman laut Olele baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- 3.1.7.2. Memperbaiki kebijakan investasi. Penyusunan produk hukum untuk kemudahan investasi, dengan menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik;
- 3.1.7.3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana prasarana kegiatan ekonomi dan menunjang investasi.

Strategi 3.1.8.

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan potensi kehutanan, pertambangan dan sumber daya energi, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 3.1.8.1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan;



- 3.1.8.2. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS;
- 3.1.8.3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya;
- 3.1.8.4. Terwujudnya kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan hutan lindung Bogani Nani Wartabone dengan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 3.1.8.5. Optimalisasi peran dan fungsi sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;
- 3.1.8.6. Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya;
- 3.1.8.7. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup;
- 3.1.8.8. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;
- 3.1.8.9. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
- 3.1.8.10. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen;
- 3.1.8.11. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
- 3.1.8.12. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi;
- 3.1.8.13. Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- 3.1.8.14. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah;
- 3.1.8.15. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penagakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- 3.1.8.16. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- 3.1.8.17. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
- 3.1.8.18. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Agenda 4.



Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur wilayah.

Sasaran 4.1:

Pengembangan kawasan yang produktif dan kompetitif.

Strategi 4.1.1.

Pembangunan Perdesaan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 4.1.1.1. Penciptaan wilayah permukiman pedesaan yang lokasinya tersebar;
- 4.1.1.2. Penciptaan lapangan kerja baru berkualitas dengan menggalakkan diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi serta merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian;
- 4.1.1.3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdagangan sebagai upaya peningkatkan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya, dan sebagai antisipasi biaya ekonomi tinggi akibat rantai pemasaran yang panjang;
- 4.1.1.4. Memperluas akses masyarakat ke sumber daya produktif dan permodalan untuk pengembangan usaha;
- 4.1.1.5. Pengembangan Budidaya pertanian (tanaman pangan, tanaman keras, perkebunan, peternakan dan perikanan), sesuai dengan potensi kesesuaian lahan, peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat perdesaan; dan
- 4.1.1.6. Pengembangan kegiatan pada kawasan pedesaan harus memperhatikan ketentuan yang telah ada mengenai kawasan lindung, swaka alam dan cagar budaya.

Strategi 4.1.2.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi rakyat, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 4.1.2.1. Mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produksi.
- 4.1.2.2. Mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Strategi 4.1.3.

Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan unggulan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 4.1.3.1. Terwujudnya kesejahteraan rakyat di kabupaten Bone Bolango;
- 4.1.3.2. Merumuskan kebijakan pengurangan ketimpangan pengembangan wilayah;



- 4.1.3.3. Peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial bagi daerah yang terisolir dan tertinggal;
- 4.1.3.4. Meningkatkan percepatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan unggulan;
- 4.1.3.5. Tertatanya Tata Ruang dan tata wilayah yang ada di kabupaten Bone Bolango; dan
- 4.1.3.6. Memberikan fasilitasi dan proteksi pengembangan kawasan unggulan dan mendatangkan investor yang bisa bekerja sama dalam budi daya tanaman unggulan.

Strategi 4.1.4.

Penataan kawasan transmigrasi, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- 4.1.4.1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat tarasmigrasi;
- 4.1.4.2. Membuat kebijakan penetapan kawasan transmigrasi;
- 4.1.4.3. Mendukung dan memberikan lahan atau lokasi menjadi tempat para trasmigrasi;
- 4.1.4.4. Pemberian kemudahan dalam pengembangan lokasi trasmigrasi;
- 4.1.4.5. Meningkatkan sarana dan prasarana dilokasi trasmigrasi;
- 4.1.4.6. Menetapkan dan menjalankan undang – undang tentang lingkungan hidup yang proporsional sesuai kondisi wilayah;
- 4.1.4.7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam menerima masyarakat tarasmigrasi; dan
- 4.1.4.8. Mendorong timbulnya kegiatan ekonomi dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya.

C. Prioritas Daerah

Dalam RPJMD priode 2005 - 2010 melaksanakan agenda pembangunan daerah disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas dan kondisi umum daerah yang dihadapi, termasuk adanya kebijakan yang perlu segera diatasi maka tidak semua prioritas tersebut dalam RPJMD menjadi proritas tahunan sehingga penuangannya ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2009. Yang menjadi proritas pembangunan pada tahun 2010 ini merupakan prioritas yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak sehingga memiliki dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya kapital. Dengan dukungan dalam bentuk upaya-upaya menciptakan kondisi Kabupaten Bone Bolango yang kondusif, adil, demokratis dan sejahtera.



Selanjutnya, berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan nasional tersebut dan disesuaikan dengan kondisi wilayah serta dengan memperhatikan RPJMD 2005-2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tahun 2010 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial.
- 2) Pengembangan SDM yang bertumpu pada penguatkecamatan dan pemerintahan desa.
- 3) Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ramah lingkungan sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah.
- 4) Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja,UMKM dan lain-lain.
- 5) Peningkatan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang amanah melalui program "Tiga Empat Dua".

Sasaran Pencapaian Prioritas Pembangunan Tahun 2010

Pencapaian prioritas pembangunan tahun 2010 dilakukan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan kerja, dalam rangka antara lain untuk pembangunan sumberdaya manusia, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan, baik untuk mempersiapkan generasi mendatang melalui peningkatan kualitas SDM serta kualitas sumberdaya produktif yang akan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Karena dengan sumber daya manusia produktif dan kualitas pengetahuan dan keterampilan lebih memiliki tubuh yang sehat, maka masyarakat dapat mengatasi dirinya dari kemiskinan.

Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung 4 (empat) program unggulan pemerintah daerah yakni pembangunan peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata, dimana program ini diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan aktifitas ekonomi riil masyarakat, yang meliputi usaha dibidang pertanian dalam arti luas, industri perdagangan dan jasa, kegiatan ekonomi riil lainnya serta pengembangan pariwisata.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, program ini diarahkan untuk mendukung dan memperlancar aktifitas perekonomian di daerah Bone Bolango akan mudah dipasarkan, input-input produksi yang dibutuhkan akan mudah didapat, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan tercapai sesuai yang diharapkan.

Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam upaya pemantapan icon program **Tiga, Empat, Dua** yakni, **cegah 3 (tiga)**; 1) tindak kekerasan/premanisme; 2) munafik/fitnah; 3) KKN. **Laksanakan 4 (empat)**; 1) ketentraman ketertiban, 2) persatuan/kesatuan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, 4) pemimpin yang merakyat; **Raih 2**



(dua); 1) stabilitas, 2. kesejahteraan, hal ini dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya aktifitas perekonomian dan kenyamanan di Kabupaten Bone Bolango. Peningkatan partisipasi masyarakat. Kita pahami bahwa pembangunan itu sebenarnya dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan menjadi salah satu kriteria yang harus diperhatikan. Terlebih lagi dengan kondisi keuangan pemerintah daerah belum mencukupi untuk memecahkan permasalahan kepada masyarakat. Dalam prioritas pembangunan ini tertuang juga didalamnya pembangunan aparatur daerah. Aparat pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan baik pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta fasilitasnya demi terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Perkembangan indikator makro sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Bone Bolango menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh komponen bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Di samping itu, keberhasilan pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah daerah, akan tetapi dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Bone Bolango dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Bone Bolango secara umum selama kurun waktu tahun 2009, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan Bone Bolango tahun 2010. Di samping itu hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan prioritas pembangunan adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bone Bolango 2005-2010.

Prioritas pembangunan tahun 2010 selanjutnya dijabarkan dalam sasaran dan program kegiatan sebagai berikut:

Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesempatan Kerja.

A. Sasarannya:

1. Menurunkan angka kemiskinan antara 27 - 28 %.
2. Meningkatnya akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
3. Meningkatnya partisipasi pendidikan dan kemampuan keaksaraan penduduk Kabupaten Bone Bolango yang diikuti dengan keadilan dan kesetaraan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.
4. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan yang merujuk pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
5. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dari Standar Kompetensi yang disyaratkan.



6. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit.
7. Meningkatnya penanganan gizi buruk dan kurang gizi.
8. Meningkatnya ketahanan pangan khususnya untuk kelompok masyarakat miskin.
9. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 17 kecamatan.
10. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
11. Tersedianya obat generik yang bermutu.
12. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6.5-7.5 % dari angkatan kerja.
13. Meningkatnya kualitas pelayanan KB/KR.

Prioritas Percepatan Pertumbuhan melalui Program Unggulan

Prioritas ini ditujukan untuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh 4 (empat) program unggulan pemerintah daerah yakni pembangunan peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.

A. Sasarannya:

1. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,07 % pada PDRB
2. Meningkatnya produktivitas pertanian.
3. Meningkatnya produktivitas peternakan.
4. Meningkatnya produktivitas perikanan.
5. Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan.
6. Meningkatnya keragaman/diversifikasi usaha ekonomi dipedesaan.
7. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
8. Pengembangan pangan lokal serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung program Desa Mandiri Pangan.
9. Meningkatkan pemberdayaan dan penataan UKM mikro/sektor informal dan penguatan kelembagaan koperasi sejenis.

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah

A. Sasarannya:

1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau masyarakat.
2. Optimalnya fungsi sarana dan prasarana sumber daya air dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan dan pengendalian bencana.
3. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dan kelembagaan.
4. Penanganan dan pemanfaatan ruang serta pengembangan wilayah.
5. Meningkatnya pengawasan pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan pemukiman.

Mewujudkan pemerintahan yang amanah melalui Program "Tiga Empat Dua"



Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam upaya pemantapan icon program Tiga Empat Dua yakni, cegah 3 (tiga); 1) tindak kekerasan/premanisme; 2) munafik/fitnah; 3) KKN. Laksanakan 4 (empat); 1) ketentraman ketertiban, 2) persatuan/kesatuan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, 4) pemimpin yang merakyat; Raih 2 (dua); 1) stabilitas, 2. kesejahteraan.

A. Sasarannya :

1. Meningkatnya standar pelayanan instansi pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
4. Berkurangnya penyalahgunaan kewenangan (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintahan.
5. Meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
6. Memberikan kesempatan keterlibatan aktif masyarakat pada proses pembangunan.
7. Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan Salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan atas dasar asas desentralisasi fiscal. Kebijakan pengalokasian pembiayaan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan secara umum di tetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) sesuai dengan urutan proritas berdasarkan isu pokok.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bone Bolango pada hakekatnya dikelola berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun



anggaran 2010 pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat/ekonomi daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah karena merupakan motor penggerak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap pendapatan daerah harus tercatat dalam dokumen APBD dimana anggaran ini setiap tahunnya akan menjadi pokok pembahasan pertama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Untuk itulah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango tahun 2009 perlu ditampilkan kondisi kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2010.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Penerimaan Daerah dalam rangka Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan". Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jadi, didasarkan pada penjelasan di atas, ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah: (1) PAD yang merupakan pencerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya, seperti pajak dan retribusi daerah, dll, (2) dana perimbangan, yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); dan (3) lain-lain pendapatan, berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengambil beberapa kebijakan dalam meningkatkan penerimaan daerah antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi. Akan tetapi kebijakan eksetensifikasi berupa penciptaan sumber pajak dan retribusi daerah baru dilaksanakan dalam kerangka mencegah timbulnya distorsi ekonomi. Oleh karena itu evaluasi terhadap pungutan retribusi daerah yang menghambat perkembangan ekonomi masih relevan. Hal ini sebagai upaya peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat dan mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi dengan harapan agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu pembenahan sarana dan prasarana terus diupayakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan masyarakat antara lain penerapan sistem komputerisasi dan lain-lain.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah



Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar pertumbuhan ekonomi seluruh daerah sangat ditopang oleh sisi konsumsi dan belanja pemerintah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bone Bolango, dimana pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah melalui instrument APBD. Karena itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pencerminan hasil pelaksanaan pembangunan, maka peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian penting dari APBD merupakan hal yang harus di kedepankan. Upaya peningkatan pendapatan dimaksud dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah Wajib Pajak, penyesuaian tarif, penyempurnaan terhadap aturan-aturan pelaksanaan, perhitungan dan pemungutan pajak, dan sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi. Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan penambahan jenis pajak, retribusi dan sumber PAD lainnya.

Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan dengan memperhatikan pos-pos sumber penerimaan baik itu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dari berbagai macam sumber penerimaan yang setiap tahun. Sumber penerimaan yang memiliki trend kenaikan setiap tahunnya dapat menjadi sumber utama pendapatan, sedangkan terhadap sumber pendapatan daerah yang berfluktuasi harus dilakukan evaluasi dan pemecahannya serta penetapan langkah-langkah strategis untuk penciptaan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan pencapaian target pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Melaksanakan intensifikasi Pendapatan Daerah dengan :
 - ❖ Memfasilitasi penyesuaian Perda – Perda Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - ❖ Meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pemungutan sumber- sumber PAD.
- b. Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan :
 - ❖ Mengidentifikasi dan mengkaji obyek-obyek yang berpotensi pendapatan daerah.
 - ❖ Melakukan pendataan subyek dan obyek baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - ❖ Membangun prasarana dan sarana sebagai wadah pemerolehan pendapatan, antara lain maksimalisasi obyek wisata, pengembangan kawasan wisata daerah, pembangunan terminal dan sebagainya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah



Berdasarkan perhitungan akhir Tahun Anggaran 2010, realisasi pendapatan daerah yakni sebesar Rp.330.332.897.581,70 atau 97,96% dari target yang direncanakan sebesar Rp.338.231.485.083,00. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.6.722.530.440,70 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.1.158.032.561,00 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.4.410.731.002,83. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.1.153.766.876,87. Dana Perimbangan sebesar Rp.312.170.424.730,00 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak sebesar Rp.26.392.828.130,00 Dana Alokasi Umum sebesar Rp.251.362.396.600,00 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.34.415.200.000,00. Dana Transfer dari Provinsi yang diperoleh dari Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah sebesar Rp.3.958.347.936,00, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.4.317.000.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain Rp.3.164.594.475,00. Selengkapnya target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.178.009.241,00	6.722.530.440,70	51,01
	a. Pajak daerah	928.079.264,00	1.158.032.561,00	124,78
	b. Hasil Retribusi daerah	6.571.937.000,00	4.410.731.002,83	67,11
	c. Lain-lain PAD yang sah	5.677.992.977,00	1.153.766.876,87	20,32
2.	Dana Perimbangan	310.534.541.542,00	312.170.424.730,00	100,53
	a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.756.944.942,00	26.392.828.130,00	106,61
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	251.362.396.600,00	251.362.396.600,00	100,00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	34.415.200.000,00	34.415.200.000,00	100,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	14.518.934.300,00	11.439.942.411,00	78,79
	a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	3.958.347.936,00	65,97



b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.299.475.000,00	4.317.000.000,00	130,84
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.219.459.300,00	3.164.594.475,00	75,00
d. Pendapatan Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	338.231.485.083,00	330.332.897.581,70	97,66

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 (Unaudited)

3. Permasalahan dan Solusi.

Dari **Tabel 3.1** diketahui bahwa realisasi pendapatan hampir mencapai 100%, namun ada beberapa pos yang tidak mencapai target, walaupun tertutupi oleh beberapa pos yang mengalami pelampauan penerimaan. Rendahnya persentase realisasi pendapatan yang dipengaruhi oleh pos retribusi daerah masih rendah dengan realisasi hanya mencapai 67,11%. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurang tepatnya kajian terhadap obyek-obyek potensi pendapatan daerah, kurangnya prasarana dan sarana penunjang dalam hal pemerolehan pendapatan, adanya pemanfaatan retribusi daerah sebagai alat pungut retribusi tanpa diimbangi dengan kesesuaian dan ketersediaan jasa layanan serta rendahnya pemahaman pengguna jasa terhadap retribusi atau pajak daerah.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pendapatan tersebut di atas, khususnya retribusi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi serta menentukan langkah-langkah strategis pemecahan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara bertahap juga berupaya untuk meningkatkan target penerimaan PAD dan merealisasikan semua target yang telah ditetapkan. Namun seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya sebagai berikut :

- Masih rendahnya penerimaan pendapatan dari sektor PAD jika dibandingkan dengan daerah lain.
- Rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak sebagian masyarakat.
- Adanya beberapa unit usaha yang untuk sementara tidak berproduksi karena perbaikan manajemen, renovasi, dan lain-lain.
- Masih rendahnya kinerja aparat pemungut/penagih pajak/retribusi.
- Keengganan para pengusaha/obyek pajak untuk dinaikan pajaknya dengan alasan biaya operasional perusahaan sangat tinggi.
- Kurang efektifnya pemberlakuan sistim bill pada obyek pajak.



- g. Masih adanya obyek pajak/pelaku usaha yang mengeluarkan biaya-biaya lain sehingga menimbulkan biaya tinggi.
- h. Adanya aturan-aturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan utamanya mengenai tarif pengenaan pajak dan retribusi, sehingga perlu dilakukan revisi atau penyesuaian.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah pemecahan antara lain :

- a. Perlu dilakukan kaji ulang potensi dan target pendapatan asli daerah. Kajian tersebut dibutuhkan untuk mendata potensi pendapatan daerah, menyusun payung hukumnya dan menetapkan target realistis pendapatan sesuai dengan kondisi faktual ekonomi daerah.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah (sekarang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) harus terus melakukan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan dengan mengundang *stakeholders* yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan maupun sosialisasi yang dilaksanakan melalui media cetak.
- c. Bagi usaha yang tutup atau berhenti sementara aktifitas produksinya, terus dilakukan pemantauan dan pembinaan serta memberikan alternatif usaha baru.
- d. Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat pemungut pajak/retribusi secara terus menerus dalam rangka menciptakan sumber daya pelayanan yang berkualitas.
- e. Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak yang berkenaan dengan peningkatan tarif pajak / retribusi, bahkan sebelum dinaikkan, pihak BKAD seyogianya melakukan uji petik selama sebulan bahkan lebih agar dapat diketahui secara pasti omset produksi yang terjual dan wajib dikenakan pajak.
- f. Karena tidak efektifnya penggunaan bill, maka BKAD perlu menetapkan target pembayaran rata-rata setiap bulannya berdasar hasil uji petik.
- g. Untuk pungutan tidak resmi yang dapat menimbulkan biaya tinggi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya.
- h. Melakukan penyesuaian atau revisi terhadap pengenaan tarif pajak/retribusi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi.
- i. Memberikan keringanan denda pajak bagi wajib pajak.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan masyarakat baik sektor perhubungan, peternakan, perikanan, perdagangan, kesehatan, pariwisata dan sektor ekonomi lainnya yang berpotensi menunjang peningkatan PAD.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.



Kebutuhan pembiayaan pembangunan setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, perbaikan kinerja organisasi pemerintahan, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya aparatur termasuk penerimaan pegawai baru serta pembangunan atau rehabilitasi prasarana wilayah. Peningkatan jumlah belanja pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango.

Belanja daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan yang penanganannya dalam bagian bidang tertentu dan dikelompokkan pada belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Untuk tahun 2010 kebijakan anggaran yang ditempuh dalam pembiayaan belanja daerah yakni 61,60% untuk belanja tidak langsung dan 38,40% belanja langsung. Tingginya presentase belanja tidak langsung tersebut disebabkan oleh tingginya belanja untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sejumlah 4.159 pegawai negeri sipil. Besaran anggaran untuk belanja langsung diarahkan untuk mendukung komitmen Pemerintah Daerah pada beberapa program prioritas Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2010 yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pengembangan Usaha Pertanian, Pengembangan Usaha Perikanan, Peternakan, dan Pengembangan Sektor Pariwisata serta Pembangunan Infrastruktur wilayah terutama dalam membuka keterisolasian daerah dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkuat perekonomian daerah guna tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi pembangunan daerah yang berbasis komoditas unggulan daerah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 bahwa belanja pengurusan urusan wajib diprioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, yang layak untuk mengembangkan sistim jaminan sosial.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam rangka pencapaian program dan prioritas pembangunan maka target belanja daerah (APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010) ditetapkan sebesar Rp.356.087.862.485,00, kemudian mengalami perubahan (APBD-P 2010) sebesar Rp.348.775.002.096,00. Perubahan belanja ini dipengaruhi oleh tingkat capaian realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan khususnya realisasi pendapatan asli Daerah. Untuk lebih jelasnya, target dan realisasi belanja pada tahun 2010 dapat dilihat pada **tabel 3.2** berikut ini:



Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010

No.	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	200.813.118.905,00	198.232.235.255,00	98,71
	1. Belanja Pegawai	172.708.354.664,00	171.270.448.282,00	99,17
	a. Gaji dan Tunjangan	147.389.383.811,00	146.525.601.296,00	99,41
	b. Tambahan Penghasilan PNS	24.045.940.853,00	23.471.968.351,00	97,61
	c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	792.000.000,00	792.000.000,00	100
	d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	481.030.000,00	480.878.635,00	99,97
	2. Belanja Subsidi	1.293.391.500,00	1.293.391.500,00	100
	a. Belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga	1.293.391.500,00	1.293.391.500,00	100
	3. Belanja Hibah	9.766.037.741,00	9.387.737.741,00	96,13
	a. Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organi sasi	9.448.137.741,00	9.069.837.741,00	96,00
	b. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masy	317.900.000,00	317.900.000,00	100,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	8.594.935.000,00	7.915.107.732,00	92,09
	a. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50
	b. Belanja Bantuan Partai Politik	7.907.435.000,00	7.230.980.000,00	91,45
	c. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	487.500.000,00	487,127,732,00	99,92
	5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.450.400.000,00	8.365.550.000,00	99,00
	a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	8.450.400.000,00	8.365.550.000	99,00
B.	BELANJA LANGSUNG	147.961.883.191,00	123.526.009.028,00	83,49
	1. Belanja Pegawai	20.875.551.745,00	19.231.051.347,00	92,12
	a. Honorarium PNS	6.912.768.500,00	6.357.703.652,00	91,97
	b. Honorarium Non PNS	13.764.409.245,00	12.676.228.295,00	92,09
	c. Uang Lembur	198.374.000,00	197.119.400,00	99,37
	2. Belanja Barang dan Jasa	51.589.506.374,00	49.752.199.560,00	96,44
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2.635.547.076,00	2.465.815.019,00	93,56



	b. Belanja Bahan/Material	3.122.414.946,00	3.085.460.130,00	98,82
	c. Belanja Jasa Kantor	8.274.412.345,00	7.265.837.212,00	87,81
	d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.574.168.041,00	3.481.623.310,00	97,41
	e. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.507.894.180,00	1.297.126.282,00	86,02
	f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	684.254.300,00	679.344.200,00	99,28
	g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	588.967.000,00	555.667.000,00	94,35
	h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	214.446.250,00	213.226.250,00	99,43
	i. Belanja Makanan dan Minuman	3.796.745.500,00	3.521.305.164,00	92,75
	j. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	456.705.500,00	444.833.950,00	97,40
	k. Belanja Pakaian Kerja	49.000.000,00	42.000.000,00	85,71
	l. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	277.525.000,00	277.127.850,00	99,86
	m. Belanja Perjalanan Dinas	25.007.730.116,00	24.250.957.293,00	96,97
	n. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	947.500.000,00	947.500.000,00	100
	o. Belanja Kursus, Pelatihan, Sos. Bimbingan Teknis PNS	340.600.000,00	302.100.000,00	88,70
	p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	70.170.000,00	70.170.000,00	100
	q. Belanja Jasa Konsultasi	41.426.120,00	41.250.000,00	99,57
	3. Belanja Modal	75.496.825.072,00	55.544.915.421,00	73,57
	a. Belanja Modal Pengadaan Tanah	576.896.000,00	576.696.000,00	99,97
	b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.531.925.000,00	2.347.405.000,00	92,71
	c. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	462.223.000,00	458.756.000,00	99,25
	d. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	346.950.000,00	345.870.000,00	99,69
	e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	283.307.000,00	274.901.000,00	97,03
	f. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	706.521.500,00	701.888.720,00	99,34



	g. Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.487.969.125,00	1.410.695.896,00	94,81
	h. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.568.807.500,00	1.382.577.780,00	88,13
	i. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	48.535.500,00	47.090.500,00	97,02
	j. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.100.000,00	19.750.000,00	98,26
	k. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	139.199.375,00	124.426.500,00	89,39
	l. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	238.820.000,00	238.299.325,00	99,78
	m. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.931.760.000,00	2.885.500.000,00	98,42
	n. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.116.940.000,00	79.440.000,00	1,12
	o. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.335.987.946,00	4.964.293.915,00	78,35
	p. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	784.756.200,00	705.524.168,00	89,90
	q. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28.080.216.846,00	26.392.944.259,00	93,99
	r. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	623.293.040,00	514.215.840,00	82,50
	s. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.023.744.000,00	11.043.597.478,00	73,51
	t. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.959.997.040,00	802.567.040,00	13,47
	u. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	153.774.000,00	153.374.000,00	99,74
	v. Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman	75.102.000,00	75.102.000,00	100
	SURPLUS/DEFISIT	(10.543.517.013,00)	7.572.495.998,70	

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 (Unaudited)

3. Permasalahan dan Solusi.

Kenyataan menunjukkan bahwa capaian target belanja terhadap realisasi belanja hanya mencapai 98,71% yang mencerminkan kinerja penggunaan anggaran yang kurang efisien. Dari keseluruhan rencana kegiatan telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang capaian realisasi tidak mencapai target, antara lain belanja modal pengadaan



alat-alat laboratorium dengan realisasi 1,12%, belanja modal pengadaan buku/kepustakaan dengan realisasi 13%, belanja modal pengadaan konstruksi jalan dengan realisasi 78%, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian*) bangunan dengan realisasi 73% dan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan realisasi 93%.

Adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di Tahun anggaran 2010 disamping adanya capaian upaya penghematan anggaran pada item-item kegiatan/program tanpa mengurangi sasaran dan tujuan dari kegiatan yang direncanakan. realisasi beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan utamanya disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, serta adanya beberapa kegiatan pengadaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang diluncurkan pada tahun 2011.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

No.	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	PENDAPATAN	338.231.485.083,00	329.656.965.313,34	97,46
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.178.009.241,00	6.722.530.440,70	51,01
	a. Pajak daerah	928.079.264,00	1.158.032.561,00	124,78
	b. Hasil Retribusi daerah	6.571.937.000,00	4.440.731.002,83	67,11
	c. Lain-lain PAD yang sah	5.677.992.977,00	1.153.766.876,87	20,32
	2. Dana Perimbangan	310.534.541.542,00	312.170.424.730,00	100,52
	a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.756.944.942,00	26.392.828.130,00	106,60
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	251.362.396.600,00	251.362.396.600,00	100,00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	34.415.200.000,00	34.415.200.000,00	100,00
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	14.518.934.300,00	11.439.942.411,00	78,79



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2010
Kabupaten Bone Bolango

	a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	3.958.347.936,00	65,97
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.299.475.000,00	4.317.000.000,00	130,84
	c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.219.459.300,00	3.164.594.475,00	75,00
	d. Pendapatan Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	200.813.118.905,00	198.232.235.255,00	98,71
	6. Belanja Pegawai	172.708.354.664,00	171.270.448.282,00	99,17
	e. Gaji dan Tunjangan	147.389.383.811,00	146.525.601.296,00	99,41
	f. Tambahan Penghasilan PNS	24.045.940.853,00	23.471.968.351,00	97,61
	g. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	792.000.000,00	792.000.000,00	100
	h. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	481.030.000,00	480.878.635,00	99,97
	7. Belanja Subsidi	1.293.391.500,00	1.293.391.500,00	100
	b. Belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga	1.293.391.500,00	1.293.391.500,00	100
	8. Belanja Hibah	9.766.037.741,00	9.387.737.741,00	96,13
	c. Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organi sasi	9.448.137.741,00	9.069.837.741,00	96,00
	d. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masy	317.900.000,00	317.900.000,00	100,00
	9. Belanja Bantuan Sosial	8.594.935.000,00	7.915.107.732,00	92,09
	d. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50
	e. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	7.907.435.000,00	7.230.980.000,00	91,45
	f. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	487.500.000,00	487,127,732,00	99,92
	10. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.450.400.000,00	8.365.550.000,00	99,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	8.450.400.000,00	8.365.550.000	99,00
C.	BELANJA LANGSUNG	147.961.883.191,00	123.526.009.028,00	83,49
	4. Belanja Pegawai	20.875.551.745,00	19.231.051.347,00	92,12
	d. Honorarium PNS	6.912.768.500,00	6.357.703.652,00	91,97
	e. Honorarium Non PNS	13.764.409.245,00	12.676.228.295,00	92,09
	f. Uang Lembur	198.374.000,00	197.119.400,00	99,37
	5. Belanja Barang dan Jasa	51.589.506.374,00	49.752.199.560,00	94,86
	r. Belanja Bahan Pakai Habis	2.635.547.076,00	2.465.815.019,00	93,56
	s. Belanja Bahan/Material	3.122.414.946,00	3.085.460.130,00	98,82
	t. Belanja Jasa Kantor	8.274.412.345,00	7.265.837.212,00	87,81
	u. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.574.168.041,00	3.481.623.310,00	97,41
	v. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.507.894.180,00	1.297.126.282,00	86,02



w. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	684.254.300,00	679.344.200,00	99,28
x. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	588.967.000,00	555.667.000,00	94,35
y. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	214.446.250,00	213.226.250,00	99,43
z. Belanja Makanan dan Minuman	3.796.745.500,00	3.521.305.164,00	92,75
â. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	456.705.500,00	444.833.950,00	97,40
bb. Belanja Pakaian Kerja	49.000.000,00	42.000.000,00	85,71
ö. Belanja Pakaian khusus dan hari- hari tertentu	277.525.000,00	277.127.850,00	99,86
dd. Belanja Perjalanan Dinas	25.007.730.116,00	24.250.957.293,00	96,97
ee. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	947.500.000,00	947.500.000,00	100
cc. Belanja Kursus, Pelatihan, Sos. Bimbingan Teknis PNS	340.600.000,00	302.100.000,00	88,70
dd. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	70.170.000,00	70.170.000,00	100
ee. Belanja Jasa Konsultasi	41.426.120,00	41.250.000,00	99,57
6. Belanja Modal	75.496.825.072,00	55.544.915.421,00	73,57
w. Belanja Modal Pengadaan Tanah	576.896.000,00	576.696.000,00	99,97
x. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.531.925.000,00	2.347.405.000,00	92,71
y. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	462.223.000,00	458.756.000,00	99,25
z. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Pternakan	346.950.000,00	345.870.000,00	99,69
â. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	283.307.000,00	274.901.000,00	97,03
ä. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	706.521.500,00	701.888.720,00	99,34
cc. Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.487.969.125,00	1.410.695.896,00	94,81
dd. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.568.807.500,00	1.382.577.780,00	88,13
bb. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	48.535.500,00	47.090.500,00	97,02
cc. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.100.000,00	19.750.000,00	98,26
dd. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	139.199.375,00	124.426.500,00	89,39
ee. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	238.820.000,00	238.299.325,00	99,78
ff. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.931.760.000,00	2.885.500.000,00	98,42
gg. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.116.940.000,00	79.440.000,00	1,12
hh. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.335.987.946,00	4.964.293.915,00	78,35
ii. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	784.756.200,00	705.524.168,00	89,90



	jj. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28.080.216.846,00	26.392.944.259,00	93,99
	kk. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	623.293.040,00	514.215.840,00	82,50
	ll. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.023.744.000,00	11.043.597.478,00	73,51
	mm. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.959.997.040,00	802.567.040,00	13,47
	nn. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	153.774.000,00	153.374.000,00	99,74
	oo. Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman	75.102.000,00	75.102.000,00	100
	SURPLUS/DEFISIT	(10.543.517.013,00)	7.572.495.998,70	
D.	PEMBIAYAAN			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.543.517.013,00	0,00	
	a. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	4.572.525.000,00	0,00	
	c. Kegiatan Lanjutan	5.970.992.013,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	10.543.517.013,00	0,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	7.572.495.998,70	

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 (Unaudited)

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Urusan Wajib Pendidikan

a. Program dan Kegiatan

Pada urusan wajib pendidikan mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp.45.655.307.846,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.188.832.600,00 atau sebesar 61,74%, yang digunakan untuk membiayai program antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dan pendidikan Menengah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pendidikan ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan



Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama dibidang pendidikan yakni berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, tetapi yang lebih menonjol adalah rendahnya kualitas sumber daya pendidikan, sarana prasarana pendidikan belum memadai khususnya pada lembaga sekolah dasar, termasuk kurangnya fasilitas penunjang proses pembelajaran berupa perpustakaan, laboratorium, buku paket dan alat peraga serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang relatif rendah.

Permasalahan lainnya yang lebih Riil adalah kurangnya anggaran pendidikan yang layak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini Pemerintah Pusat serta pemerintah Daerah tetap akan mengusahakan anggaran untuk pemenuhan SPM tersebut. Standar pelayanan minimal pendidikan yaitu: (1). Standar Kurikulum/Isi (2). Standar Proses Belajar Mengajar (PBM) (3). Standar Kompetensi Lulusan (4). Standar Pengelolaan Pendidikan (5). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (6). Standar Sarana Prasarana (7). Standar Pembiayaan Pendidikan (8). Standar Penilaian Pendidikan.

Solusi untuk menyelesaikan terhadap permasalahan diatas adalah:

- Perlu adanya tindak lanjut pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat melalui perluasan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
- Pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga tak mampu, dan subsidi operasional pendidikan bagi siswa miskin khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Atas.
- Peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penerapan kurikulum berbasis kawasan.
- Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Sertifikasi guru.
- Pembangunan Gedung Sekolah semua jenjang Pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA/SMK.
- Rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya di daerah terpencil dan terisolir melalui subsidi Guru daerah terpencil.
- Pelibatan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pengelolaan pendidikan.
- Penyelenggaraan Pendidikan gratis di SD dan SMP.



- Penguatan Pengelolaan Pendidikan melalui Regulasi daerah yang mengatur Pendidikan khususnya SPM. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dicapai melalui Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional (FLS2N) sampai ke Tingkat Nasional.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tahun 2010 antara lain ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita dan penurunan angka penderita gizi kurang sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Indikator Keberhasilan Kesehatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2010

INDIKATOR	2009	2010
1. Angka Kematian Bayi (Mortalitas)	51	49
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan	9	9
3. Angka Kematian Balita	12	11
4. Prevalensi Gizi Buruk	1,09%	0,7%
5. Penderita Gangguan Jiwa	5	13

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka kematian ibu melahirkan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya jumlah bidan yang ada, terutama bidan desa. Saat ini, hanya 50 bidan desa yang tersedia, padahal kondisi idealnya Kabupaten Bone Bolango membutuhkan 166 bidan untuk disebar merata sampai ke seluruh desa.

a. Program dan Kegiatan

Pada APBD tahun 2010 ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menganggarkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sektor kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.7.867.329.975,00 dengan realisasinya sebesar Rp.6.823.966.925,00 atau 86,74% Sedangkan untuk sektor Rumah Sakit Umum Tombulilato sebesar Rp.1.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.225.844.039,00 atau 98,07% dan untuk sektor Rumah Sakit Umum Daerah Toto sebesar Rp.7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.257.935.682,00 atau 103,68%.

Program dan kegiatan sektor kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 yaitu:

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, melalui kegiatan:
 - i) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;



- ii) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
- iii) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan:
 - i) Revitalisasi sistem kesehatan;
 - ii) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
 - iii) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;
 - iv) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 3) Program Pengawasan Obat dan makanan, melalui kegiatan:
 - i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan:
 - i) Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan;
 - ii) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, melalui kegiatan:
 - i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, melalui kegiatan:
 - i) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat;
 - ii) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat;
 - iii) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, melalui kegiatan:
 - i) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk;
 - ii) Peningkatan Imunisasi;
 - iii) Peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (ID) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
 - ii) Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan;
 - iii) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan Puskesmas;
 - ii) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK);
 - iii) Pembangunan Puskesmas (DAK);
 - iv) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu;
 - v) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK);
 - vi) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pendamping DAK).
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, melalui kegiatan:
 - i) Pelatihan dan pendidikan perwatan anak balita;
 - ii) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;



11) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan, melalui kegiatan:

- i) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga;

Untuk Program dan kegiatan sektor Rumah Sakit Umum Tombulilato yang dilaksanakan pada tahun 2010 yaitu:

1) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, melalui kegiatan:

- i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III);
- ii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit;
- iii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit;
- iv) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit;

2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, melalui kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit.

Sedangkan untuk Program dan kegiatan sektor Rumah Sakit Umum Tombulilato yang dilaksanakan pada tahun 2010 yaitu:

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit paru-Paru/Rumah Sakit Mata melalui kegiatan:

- i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit;
- ii) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit;
- iii) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK);
- iv) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain);

3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kesehatan ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

c. Permasalahan dan Solusi



Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan adalah

1. Masih ada beberapa kegiatan yang rincian kegiatan (PP 59 Tahun 2007) dalam aplikasi SIMDA yang belum sesuai dengan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan.
2. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan di Triwulan IV menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan.

Sedangkan solusi dari pemecahan masalah tadi adalah

1. Menyesuaikan kegiatan yang direncanakan dengan nomenklatur kegiatan yang ada di aplikasi SIMDA.
2. Mengganggu kembali kegiatan tersebut ditahun 2011.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Keberhasilan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bone Bolango sampai dengan Tahun 2010

1	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jalan Kab. Dalam kondisi baik X100%	414	x 100%	95,40
		Panjang seluruh Jalan Kabupaten	434,409		
2	% Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas Irigasi Kabupaten Baik X100%	1.546	x 100%	83,75
		Luas Irigasi Kabupaten	1846		
3	% Rumah tangga bersanitasi	jumlah rumah tangga ber sanitasi X100%	12.350	x 100%	79,26
		jumlah total rumah tangga	15.582		
4	% Kawasan kumuh	luas kawasan kumuh X100%	256	x 100%	12,90
		luas wilayah	1984		
5	% Kawasan yang masih terjadi genangan	luas kawasan genangan X100%	256	x 100%	12,90
		luas wilayah	1984		



6	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	luas ruang terbuka X100%	200.247	x 100%	100,00
		luas wilayah ber HPL/HGB	200.247		

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka menempatkan sektor pekerjaan umum sebagai sektor yang strategis.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah tahun 2010, melalui Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp.35.764.796.802,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.38.746.212.602,00 atau 108,34%.

Program dan Kegiatan untuk urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan pada tahun 2010 ini terdiri dari

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan Jalan (lanjutan);
 - ii) Pembangunan Jalan;
 - iii) Pembangunan Jembatan (lanjutan);
 - iv) Pembangunan Jembatan;
 - v) Perencanaan Pembangunan Jalan (lanjutan);
 - vi) Perencanaan Pembangunan Jalan;
 - vii) Perencanaan Pembangunan Jembatan (lanjutan);
 - viii) Perencanaan Pembangunan Jembatan;
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
 - ii) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (lanjutan);
 - iii) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- 3) Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai;
 - ii) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air & badan-badan sungai (lanjutan);
 - iii) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali;
- 4) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui kegiatan:
 - i) Pemetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (DAK);
 - ii) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (lanjutan);
 - iii) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan;



- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, melalui kegiatan:
 - i) Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK);
 - ii) Pengembangan sistem distribusi air minum (lanjutan);
 - iii) Pengembangan sistem distribusi air minum;
- 6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan:
 - i) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (lanjutan);
 - ii) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
 - iii) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
 - iv) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK);
 - v) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (lanjutan);
 - vi) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan;
 - vii) Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan (DAK);
 - viii) Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan;
- 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan:
 - i) Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai (Lanjutan);
 - ii) Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Lanjutan);
 - iii) Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (Lanjutan);
 - iv) Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - v) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK);
 - vi) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan);
 - vii) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum tahun 2010 adalah telah dibangunnya jalan sepanjang 4.480 Km, dibangunnya dan direhabilitasinya jembatan sebanyak 9 unit, Saluran irigasi tahun 2010 yaitu 2539.325m.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pekerjaan umum ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Masih terbatasnya akses transportasi darat ke kantong-kantong produksi yang akan membuka keterisolasian wilayah
- 2) Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan banjir
- 3) Masih banyak jaringan irigasi yang rusak
- 4) Masih terbatasnya sarana prasarana kebinamargaan



- 5) Belum tertatanya batas wilayah antar kabupaten maupun antar provinsi.
- 6) Masih terdapatnya beberapa desa yang sulit akan keterjangkauan terhadap sumber air maupun air bersih.

Solusi:

- 1) Membuka jalur akses bagi masyarakat di wilayah terisolir maupun wilayah yang menuju kantong produksi.
- 2) Meningkatkan frekuensi upaya penanggulangan bencana dengan membangun talud pengaman pantai, membangun bronjong maupun normalisasi sungai.
- 3) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi.
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan.
- 5) Melaksanakan survey dan penelitian untuk mencari sumber-sumber air baku, khususnya pada wilayah-wilayah yang sulit memperoleh sumber air.

1. Urusan Wajib Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung pada proses perencanaan, yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan tingkat desa (musrenbangdes), dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar atau pedoman proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Proses pembangunan daerah dilaksanakan melalui satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dalam tahapan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Untuk tahun 2010 alokasi anggaran sebesar Rp.3.182.068.234,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.198.340.394,00 atau 69,09%, melalui BAPPEDA telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang melalui kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- 2) Program Pengembangan Data/ Informasi, dengan kegiatan:
 - i) Penyusunan Profil Daerah;
 - ii) Penyusunan dan Pengumpulan data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar, melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan.
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui kegiatan:



- i) Penyusunan Rancangan RPJPD;
 - ii) Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - iii) Penyusunan Rancangan RKPDP;
 - iv) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
 - v) Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik;
 - vi) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
 - vii) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui kegiatan: Koordinasi Penyusunan Pembangunan Bidang Ekonomi.
- 6) Program Perencanaan Sosial Dan Budaya, melalui kegiatan:
- i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - ii) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, melalui kegiatan:
- i) Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB;
 - ii) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah;
 - iii) Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib perencanaan pembangunan ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti pada pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan ini, hanya saja pada saat penyusunan RPJP tidak terlaksanakan karena mengalami rasionalisasi, sedangkan untuk kegiatan penyusunan dokumen LKPJ dan LAKIP mendapatkan kesulitan dalam memperoleh data dari SKPD, walaupun dokumennya dapat dirampungkan namun sebagian besar SKPD lambat memasukkan data dan laporan yang diminta bahkan ada SKPD yang tidak memasukkan data maupun laporan.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada proses perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

- Rendahnya kualitas data perencanaan dan pelaporan
- Belum efektifnya pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan
- Dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan belum memenuhi standar kebutuhan secara ideal



Berkenaan dengan permasalahan di atas dapat di ambil solusi sebagai berikut :

- Pengembangan data base perencanaan daerah melalui pembangunan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan unit-unit perencanaan pada tingkat SKPD dan atau unit terkait lainnya.
- Pembuatan regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman yang akan mengikat komitmen bersama serta mengarahkan konsistensi proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- Sinkronisasi dan pengintegrasian rencana sektoral serta rencana wilayah secara berkala dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kapasitas aparatur perencana termasuk perencana dilingkungan SKPD melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan, magang, workshop, serta pembinaan kekhususan dibidang perencanaan.

2. Urusan Wajib Perhubungan

a. Program dan Kegiatan

Urusan ini dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur perhubungan maupun perkembangan wilayah secara berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk tahun 2010 Alokasi anggaran sebesar Rp.2.364.686.000,00 dengan realisasi Rp.1.976.849.859,00 atau 83,60%, melalui Dinas Perhubungan dan Postel telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan perhubungan yaitu

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, melalui kegiatan:
 - i) Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
 - ii) Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang;
 - iii) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan;
 - iv) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (DAK)
 - v) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
 - vi) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan.
- 2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas melalui kegiatan:
 - i) Pengadaan Marka Jalan;
 - ii) Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas.



b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib perhubungan ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama pada urusan perhubungan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- Belum adanya fasilitas perhubungan terutama terminal sebagai pengatur simpul.
- Belum adanya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan tertentu.
- Belum adanya fasilitas penjamin keselamatan transportasi berupa fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
- Kurangnya sumber daya aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan darat.
- Belum adanya peraturan daerah tentang retribusi dan regulasi di bidang perhubungan.

Berkenaan dengan permasalahan diatas, beberapa solusi :

- Mengupayakan pembangunan terminal tipe C, fasilitas keselamatan jalan, fasilitas penjamin keselamatan transportasi berupa balai pengujian kendaraan bermotor yang terstandarisasi.
- Perlu adanya bimbingan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor tingkat pemula.
- Perlu adanya pendistribusian pegawai PNS yang telah mengikuti pelatihan termasuk penyidik PNS khusus bidang perhubungan oleh BKD-diklat.
- Pengajuan perda tentang retribusi dan regulasi di bidang perhubungan sementara dalam proses pengajuan di DPRD.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota didukung dengan penganggaran dari APBD 2010 sebesar Rp.1.748.743.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.600.301.877,00 atau 91,51%. Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan:
 - i) Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - ii) Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK).
- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, melalui kegiatan:



- i) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
 - ii) Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA.
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melalui kegiatan:
- i) Pemeliharaan RTH;
 - ii) Pengawasan dan Pengendalian RTH;
 - iii) Penataan RTH;
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib lingkungan hidup ini dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1). Keterbatasan anggaran untuk APBD dan APBN
- 2). Kurangnya teknisi Laboratorium
- 3). Penempatan PNS tidak sesuai dengan latar belakang
- 4). Belum ada kejelasan RTRWK Bone Bolango
- 5). Kurangnya SDM penunjang kegiatan

Solusi:

- 1) Sangat diperlukan penambahan jumlah dan pelatihan aparat dinas teknis.
- 2) Perlu adanya sosialisasi yang intensif dan terpadu tentang penyelenggaraan proyek.
- 3) Adanya porsi anggaran yang lebih besar dari APBD
- 4) Pengisian staf disesuaikan dengan latar pendidikan.
- 5) Perlu adanya RTRWK yang tetap.

4. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bone Bolango, maka program yang dilaksanakan untuk tahun 2010 adalah program yang difokuskan pada penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan berupa pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, Implementasi sistem administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



Program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperoleh alokasi anggaran pada APBD Tahun 2010 ini sebesar Rp.673.786.840,00 Melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatannya meliputi:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan;
- 3) Pengembangan Data Base Kependudukan;
- 4) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 6) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan);
- 7) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp.587.315.845,00 atau 84,38%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
3. Rendahnya mutu pengendalian pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelayanan administrasi kependudukan masih terpusat di tingkat kabupaten

Solusi :

1. Peningkatan kualitas tenaga pengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna pelayanan yang optimal antara lain pembangunan gedung yang representatif, kendaraan operasional, sistem informasi jaringan untuk kecamatan.
3. Perlu adanya penertiban dan ketentuan administrasi kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan mobile.

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

a. Program dan Kegiatan



Peran kaum perempuan sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan sangat dibutuhkan untuk memperkuat status sosial ekonomi masyarakat.

Untuk tahun 2010, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dengan anggaran sebesar Rp.981.555.025,00. Adapun program dan kegiatannya meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, melalui kegiatan;
 - i) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah;
 - ii) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 4) Program Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan:
 - i) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
 - ii) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - iii) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
 - iv) Pengembangan data base kependudukan;
 - v) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;
 - vi) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan;
 - vii) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemberdayaan perempuan sebesar Rp.520.905.600,00 atau 99,56%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana terdapat beberapa permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan peran, kapasitas dan kapabilitas perempuan. Masalah itu antara lain adalah :

1. Belum adanya database statistik gender dan Anak
2. Belum optimalnya peran perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan



3. Belum adanya komitmen bersama yang kuat dari satuan kerja pemerintah daerah lainnya untuk mengedepankan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Masih rendahnya validitas data pasangan usia subur dan peserta akseptor KB
5. Rendahnya animo masyarakat khususnya pasangan usia subur sebagai calon peserta akseptor KB dalam keikutsertaan ber-KB
6. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana informasi program KB
7. Kurangnya Petugas Lapangan KB/PPKBD dan Sub PPKBD di Tingkat Desa dan Dusun yang ada di Kecamatan.

Berkenaan dengan permasalahan diatas maka beberapa solusi yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

4. Melaksanakan pendataan potensi dan peran kaum perempuan
5. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat serta aparatur dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi
6. Pengembangan database akseptor KB termasuk labelisasi peserta KB
7. Peningkatan intensitas dan efektivitas sosialisasi program KB dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana informasi KB
8. Peningkatan ketersediaan sumber daya Petugas Lapangan KB/PPKBD dan Sub PPKBD.

9. Urusan Wajib Sosial

a. Program dan Kegiatan

Fungsi pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan ketelantaran, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, kecacatan, keterpencilan/ ketertinggalan, korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat tertangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan kesejahteraan merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal ini dipandang sebagai bagian dari investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan



Untuk tahun 2010, melalui Dinas Sosial telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan sosial dengan anggaran sebesar Rp.850.000.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya melalui kegiatan:
 - i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin;
 - ii) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan:
 - i) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa;
 - ii) Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, melalui kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib sosial sebesar Rp.696.969.890,00 atau 82,00%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Rendahnya validitas dan reliabilitas data penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang program sosial
3. Rendahnya efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial
4. Kurangnya sumber daya penunjang dalam pelaksanaan kegiatan sosial

Solusi :

1. Perlu penyelenggaraan pendataan yang akurat secara berkala dan terus menerus
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana penunjang program sosial
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sosial secara terintegrasi dan terkoordinasi



4. Intenistas evaluasi dan pelaporan dalam memberikan data terbaru tentang perkembangan program Bidang kesejahteraan sosial
5. Peningkatan peran lembaga sosial masyarakat dan tenaga pendamping dalam upaya penanggulangan masalah kesenjangan sosial (social gap)

10. Urusan Wajib Tenaga Kerja (CEK)

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan tenaga kerja di tahun 2009 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dianggarkan sebesar Rp.903.746.000,00. Adapun Program dan kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.
- 2) Program Pengembangan Nilai Budaya, melalui kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan tenaga kerja sebesar Rp.537.656.294,00 atau 56,46%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara makro permasalahan yang dihadapi urusan tenaga kerja antara lain:

1. Kondisi jumlah angkatan kerja semakin bertambah sedangkan volume lapangan kerja masih sangat terbatas
2. Sebagian besar spesifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja
3. Belum terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah daerah pengirim transmigran dan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Terbatasnya infrastruktur penunjang pada lokasi pemukiman transmigran

Berkenaan dengan permasalahan di atas, dilakukan berbagai bentuk kebijakan, program kegiatan sebagai solusi penyelesaian, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan sektor lainnya dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi dan investasi guna terciptanya lapangan kerja yang bersesuaian.



2. Mendorong / menciptakan lapangan kerja baru melalui bimbingan usaha mandiri sektor informal baik perorangan maupun kelompok.
3. Peningkatan kemampuan SDM pencari kerja secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan dan bursa kerja serta memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan di tingkat daerah baik lokal, regional maupun nasional.
5. Membangun kesepakatan bersama antara daerah pengirim dengan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Peningkatan prasarana dan sarana yang berkualitas di lokasi permukiman transmigrasi.
7. Pembuatan site plan di wilayah permukiman transmigrasi guna menciptakan kawasan produktif.

11. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2010, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga dengan anggaran sebesar Rp.796.037.500,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan melalui kegiatan:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
 - ii) Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan;
- 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda, melalui kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda.
- 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, melalui kegiatan
 - i) Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat;
 - ii) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Wujud nyata keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemuda dan olahraga ini dapat dibuktikan dengan prestasi dan keberhasilan atlit-atlit Bone Bolango dalam kejuaraan baik daerah maupun nasional dari cabang Kejurnas atletik meraih juara II di Jogyakarta tahun 2009, juara I Estafet atletik di Thailand 2009, Juara III tenis meja, dan juara II untuk Olah raga Tradisional di



semarang. Untuk Prestasi Pemuda tahun 2010 antara lain pertukaran pemuda antar Provinsi sebanyak 7 orang dan terjaringnya Pasukan pengibar Bendera tingkat Provinsi.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemuda dan olahraga sebesar Rp.717.480.430,00 atau 90,13%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Pada pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga tahun 2007-2009 ini permasalahannya adalah:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
- 2) Masih terbatasnya kegiatan-kegiatan untuk penjaringan atlet – atlet berpotensi di daerah.
- 3) Masih terbatasnya anggaran untuk pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional.
- 4) Perlunya peningkatan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi baik insentif maupun jaminan kesejahteraan hari tua.
- 5) Masih kurangnya Wasit/Juri dari berbagai Cabang Olah Raga yang memenuhi kualifikasi standar Nasional.
- 6) Masih kurangnya kreatifitas pemuda dalam berbagai kegiatan khususnya dalam bidang usaha dalam membentuk pemuda yang mandiri.

Solusi dari beberapa permasalahan di atas adalah :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- 2) Peningkatan upaya penggalangan dana guna menunjang pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional, baik yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN), swasta serta partisipasi masyarakat.
- 3) Pelaksanaan pelatihan Wasit/Juri olah raga.
- 4) Memotivasi kepada masyarakat tentang pentingnya olah raga melalui sosialisasi serta kegiatan olah raga di masyarakat.
- 5) Pembentukan dan pelatihan kelompok usaha pemuda secara rutin.
- 6) Pemberian modal kepada kelompok usaha pemuda produktif serta penghargaan kepada pemuda pelopor atas pengabdian dan dedikasinya terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan

12. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 maka kesatuan bangsa dan politik berperan dalam peningkatan rasa aman, nyaman dan lingkungan daerah yang kondusif. Pengembangan dan pengelolaan urusan ini perlu dilakukan secara



terus menerus sesuai dengan tuntutan dan tantangan pokok kedepan

Untuk tahun 2010, melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik Satpol dan Perlindungan Masyarakat telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp.650.000.000,00. Adapun Program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan:
 - i) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat;
 - ii) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat, melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban Bencana alam, melalui kegiatan Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp.743.116.500,00 atau 99,99%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi Perlindungan Masyarakat
2. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai nasionalisme
3. Terbatasnya anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mengingat tahun ini akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Gorontalo Tahun 2012, stabilitas keamanan wilayah tetap terus dijaga.

Solusi dari permasalahan diatas yakni :

1. Perlu peningkatkan pembinaan dan pengendalian Tupoksi Perlindungan Masyarakat.



2. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan secara terus menerus atau bentuk kegiatan lainnya kepada seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda dengan melibatkan peran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan.

13. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada urusan wajib ini terdiri dari beberapa SKPD, seperti Sekertariat Daerah yang terdiri dari beberapa bagian, Sekertariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan Kantor Pelayanan Terpadu, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

❖ **Sekertariat Daerah**

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2010, melalui Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, Bagian Umum dan Bagian Kesra pada Sekertariat Daerah telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dengan anggaran sebesar Rp.8.450.000.000,00. Adapun Program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melalui kegiatan:
 - i) Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
 - ii) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah;
 - iii) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, melalui kegiatan:
 - i) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik;
 - ii) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi;
 - iii) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik;
- 3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, melalui kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru.
- 4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, melalui kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan:



- i) Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
- ii) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
- 6) Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, melalui kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, melalui kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
- 9) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, melalui kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.
- 10) Program Pengembangan Nilai Budaya, melalui kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.7.878.409.635,00 atau 96,60%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

❖ Sekretariat DPRD

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2010, melalui Sekretariat DPRD telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dengan anggaran sebesar Rp. 7,016,806,000,00. Adapun Program yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan:
 - i) Rapat-Rapat Paripurna;
 - ii) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - iii) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - iv) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - v) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah;
 - vi) Kegiatan Reses;
 - vii) Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
- 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.833.826.944,00 atau 97,39%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
2. Masih kurang pemahaman akan tugas pokok dan fungsi aparat.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango kurang memadai.
4. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politik yang cukup kental dilingkungan kerja.
5. Kurang pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD, antara lain pada masalah perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah.

Solusi :

1. Membuka kesempatan mengikuti Bimtek atau Diklat bagi aparatur.
2. Penetapan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan pejabat pelaksana secara jelas dan sistematis.
3. Menjalin hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.
4. Menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

❖ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tahun 2009 melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp.3.783.847.027,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
 - i) Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah (Lanjutan);
 - ii) Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah;
 - iii) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;



- iv) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- v) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- vi) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- vii) Penyusunan Standar Satuan Harga;
- viii) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ix) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- x) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
- xi) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- xii) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD;
- xiii) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- xiv) Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah keberhasilan penyusunan dokumen APBD Tahun 2010, walaupun tidak tepat waktu. Adapun Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.3.688.551.530,00 atau 97,48%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2010 ini belum menemui permasalahan yang berarti, walaupun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, dengan mengefisienkan penggunaan anggarannya, semua tujuan pelaksanaan kegiatan dapat direalisasikan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

❖ Inspektorat Daerah

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tahun 2010 melalui Inspektorat Daerah telah dianggarkan pada APBD sebesar



Rp.2.513.750.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
 - i) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - ii) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - iii) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif;
 - iv) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Inspektorat Daerah sebesar Rp.1.464.956.986,00 atau 97,32%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2010 ini belum menemui permasalahan yang berarti.

❖ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib di tahun 2010 melalui kantor pelayanan terpadu telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp.800.000.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
- 2) Program penataan peraturan perundang-undangan, melalui kegiatan Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kantor pelayanan terpadu sebesar Rp.684.200.840,00 atau 98,89%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam hal Pengurusan Perizinan



2. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelayanan perizinan misalnya: gedung kantor, peralatan/perlengkapan kantor
3. Masih kurangnya sosialisasi Perda no 4 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia terutama Tenaga Teknis Lapangan dalam pengurusan izin

Solusi :

1. Peningkatan Sosialisasi Perizinan di Tingkat Desa dan Kecamatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Teknis Lapangan

❖ **Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT**

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat, tetapi lebih terarah kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan harapan Aparatur yang dibina dan dikembangkan sumber dayanya dapat meningkatkan kerjanya, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk tahun 2010, melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.4.815.565.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah;
 - ii) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah;
 - iii) Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah;
 - iv) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
 - (i) Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
 - (ii) Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi;
 - (iii) Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah;
 - (iv) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
 - (v) Penempatan PNS;



- (vi) Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
- (vii) Seleksi Penerimaan Calon PNS;
- (viii) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- (ix) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.4.621.277.600,00 atau 96,58%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Masih rendahnya kompetensi, kualitas dan profesionalisme aparatur daerah.
2. Proses pembinaan karir dan pengembangan aparatur daerah yang belum sepenuhnya mengacu pada proses prosedur dan mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil.
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian, sebagai akibat belum adanya standar pelayanan dan prosedur tetap pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Tingginya perputaran pegawai dalam memenuhi kebutuhan formasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
5. Belum adanya sarana dan prasarana diklat.
6. Belum adanya penerapan manajemen *reward dan punishment*.

Solusi :

1. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam bentuk pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan *assesment center* dalam proses seleksi penempatan dalam jabatan.
2. Pembuatan standar pelayanan minimal dan prosedur tetap pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Memperkuat penataan manajemen perputaran dan penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan dan analisis jabatan.
4. Penataan manajemen *reward dan punishment* aparatur melalui pembuatan legislasi daerah.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan suatu daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata akan tetapi peran serta aktif masyarakat akan menjadikan pembangunan yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan PNPM-MP antara lain :



1. Keberdayaan masyarakat miskin dalam berpartisipasi secara langsung pada proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MP di wilayahnya masing-masing.
2. Kebutuhan dasar masyarakat miskin telah terpenuhi secara bertahap melalui PNPM-MP berupa :
 - a. Pekerjaan infrastruktur / sarana dan prasarana yang sangat mendesak
 - b. Simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP)
 - c. Bea Siswa
3. Melalui kegiatan PNPM-MP dapat mengurangi pengangguran di wilayah kecamatan lokasi PNPM-MP karena banyak masyarakat yang menjadi pelaku lokal di wilayah masing-masing
4. Dapat menurunkan angka kemiskinan.

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2010, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan anggaran sebesar Rp.1.519.280.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan:
 - i) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa;
 - ii) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
 - iii) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan:
 - (i) Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - (ii) Pelaksanaan Musyawarah dalam Pembangunan Desa.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.1.070.336.300,00 atau 98,89%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum adanya komitmen pemerintah melalui penyiapan dana pendamping sebagai konsekuensi pelaksanaan program yang didanai oleh APBN

Solusi :



1. Peningkatan koordinasi dalam penyiapan dana pendamping pada program kegiatan yang didanai oleh APBN menghindari sanksi yang dapat merugikan masyarakat.

15. Urusan Wajib Kearsipan, Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2010, melalui Badan Komunikasi, Informasi dan Kehumasan telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, melalui kegiatan:
 - i) Pengumpulan Data;
 - ii) Pengklasifikasian Data
- (2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pengadaan Alat studio dan komunikasi.
- (3) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib komunikasi dan informatika melalui Badan Komunikasi, Informasi dan kehumasan adalah Rp.660.592.500,00 atau 99,90%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

16. Urusan Wajib Perpustakaan

a. Program dan Kegiatan

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2010 dengan anggaran Rp.1.122.529.265,00 untuk membiayai program dan kegiatan yang meliputi : (1) Pengembangan minat dan budaya baca, (2) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dan (3) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah memperoleh alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Bone Bolango sebesar dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.122.522.265,00 atau 99,99%.

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

1. Sarana dan Prasarana belum memadai.



2. Belum optimalnya sumber daya manusia khususnya tenaga pustakawan.
3. Masih kurangnya minat baca pada masyarakat.

Solusi :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sistem informasi perpustakaan
2. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional.
3. Perlunya Diklat fungsional Pustakawan
4. Mengadakan sosialisasi minat baca ke desa-desa khususnya di daerah-daerah terpencil

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

a. Urusan Pilihan Pertanian

❖ Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1) Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.4.967.045.000,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan:
 - i) Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - ii) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah;
- (3) Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan meliputi:
 - i) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian;
 - ii) Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
 - iii) Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
 - iv) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering;
 - v) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;
 - vi) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian melalui Bantuan Keuangan Khusus;
- (4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.



2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) tahun 2010 adalah dengan meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu melalui bantuan langsung masyarakat dan pemberian bantuan sarana prasarana produksi serta penerapan teknologi tepat guna. Dengan penyaluran benih tanaman pangan khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai pada tahun 2009, diharapkan dapat mencapai target pencapaian produksi dan produktivitas komoditi tersebut. Hal ini secara langsung berdampak pada kinerja sektor tanaman pangan pada khususnya dan sektor pertanian pada umumnya.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp.4.628.876.780,00 atau 88,69%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi

1. Belum ada master plan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Belum ada perlindungan lahan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) secara berkelanjutan
3. Petani kekurangan modal untuk pengadaan sarana produksi
4. Kesadaran petani dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah masih kurang
5. Kurangnya kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan tidur secara optimal
6. Belum ada insentif kepada petugas Statistik Pertanian
7. Masih Kurangnya sarana jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi.
8. Kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di tingkat usaha tani masih rendah
9. Belum optimalnya penggunaan lahan terutama penerapan diversifikasi pangan dan perkebunan
10. Diversifikasi pangan belum optimal
11. Kelembagaan petani masih lemah
12. Pemberian bantuan kepada petani tidak sesuai dengan musim tanam
13. SDM petani masih rendah

Solusi yang perlu dilakukan



1. Pengusulkan kegiatan untuk menyusun master plant untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Merancang aturan/PERDA kepada DPRD tentang perlindungan lahan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) secara berkelanjutan
3. Mengusulkan alokasi kegiatan untuk pengadaan sarana produksi
4. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan Kesadaran petani dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah
5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan tidur secara optimal
6. Mengusulkan alokasi kegiatan untuk memberikan insentif kepada petugas Statistik Pertanian
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi.
8. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di tingkat usaha tani
9. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk mengoptimalkan penggunaan lahan terutama penerapan diversifikasi pangan dan perkebunan
10. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk melakukan Diversifikasi pangan
11. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan Kelembagaan petani
12. Menyusun strategi untuk Pemberian bantuan kepada petani tepat waktu dan sesuai dengan musim tanam
13. Mengusulkan kegiatan untuk studi banding ke daerah yang lebih maju

❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk urusan pilhan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.984.014.000,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- (2) Program Peningkatan Produksi Peternakan, melalui kegiatan:



- i) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna;
 - ii) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak;
 - iii) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna;
- (3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran peningkatan ketahanan pangan hewani melalui peningkatan populasi ternak khususnya sapi melalui program pengadaan 5.000 ekor sapi. Dengan adanya upaya peningkatan populasi ternak khususnya sapi pada tahun 2010, diharapkan Kabupaten Bone Bolango menjadi sentra produksi pemasaran ternak sapi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan khususnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp.683.631.729,00 atau 97,11%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang lebih mendasar dalam program pemberian bantuan ternak pada masyarakat adalah :

1. Tingkat Kematian Pedet dan induk sapi masih relatif tinggi
2. Tingkat pemotongan sapi betina produktif masih sangat besar
3. Rendahnya tingkat kelahiran Pedet
4. Kurangnya SDM dibidang kesehatan hewan

Solusinya adalah :

1. Menekan angka kematian pedet dan induk sapi dengan memberikan pelayanan secara optimal serta penyediaan pakan secara memadai
2. Mencegah pemotongan sapi betina produktif dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkan kembali pada peternak yang layak sebagai penerima bantuan.
3. Meningkatkan program Inseminasi Buatan (IB).
4. Rekrutmen tenaga Dokter Hewan

❖ **Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan**



a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.699.500.000,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan, dengan rincian kegiatan:
 - i) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan;
 - ii) Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan produktivitas pertanian, maka penyuluh pertanian memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program pertanian. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, maka pada tahun 2010 ini dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi penyuluh serta pemberian insentif kepada penyuluh.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Teknis Terpadu adalah sebesar Rp.532.244.596,00 atau 99,62%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi Dan Informasi Pertanian (P3TIP) memiliki permasalahan yaitu Penyelenggaraan kegiatan UPFMA pada 10 Desa yang tidak mengusulkan proposal pembelajaran TA 2010 yang disebabkan oleh:

- a. Adanya pengurus UPFMA yang tidak aktif.
- b. Pendampingan TPL yang kurang intensif.

Solusi :

- a. Pembinaan dan pergantian pengurus UPFMA melalui rembuk tani.
- b. Pembinaan kepada TPL (Tenaga Penyuluh Lapangan) dalam pendampingan fasilitas UPFMA.

b. Urusan Pilihan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan

Wilayah Bone Bolango merupakan daerah subur dengan keberadaan hutan yang cukup luas. Kurang lebih 74% wilayah Kabupaten Bone Bolango merupakan Wilayah Taman Nasional.



Program dan kegiatan untuk urusan pilihan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.719.875.000,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan rincian kegiatan:
 - i) Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
 - ii) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Laporan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan yang dikirimkan tidaklah lengkap sehingga realisasi yang tercatat hanya sebesar 99,45% atau sebesar Rp.715.970.200,00. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dalam urusan kehutanan saat ini khususnya dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan adalah keterbatasan SDM (POLHUT), dan anggaran pengawasan. Selain itu permasalahan lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah dalam pelestarian sumber daya hutan.

Solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah pelaksanaan operasi pengamanan pencurian kayu harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur POLRI dan TNI, sedangkan untuk masyarakat diperlukan sosialisasi atau pembinaan secara intensif terhadap masyarakat terhadap bahaya perusakan hutan dan lahan.

c. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.828.889.035,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan rincian kegiatan:
 - i) Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan;



- ii) Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C.
- (2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dengan rincian kegiatan:
 - i) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat;
 - ii) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat.
- (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan yang dilaksanakan Koordinasi Pengembangan Ketenaga listrikan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp.827.389.910,00 atau 99,81%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

d. Urusan Pilihan Pariwisata dan Kebudayaan

a. Program dan Kegiatan

Sebagai salah satu yang sumber pendapatan asli daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata harus ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menetapkan kebijakan untuk meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur penunjangnya serta mengupayakan pembukaan obyek-obyek wisata baru, baik wisata alam, wisata bahari serta wisata budaya.

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.899.693.650,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kemitraan, dengan rincian kegiatan:
 - i) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata;
 - ii) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan;
- (2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan rincian kegiatan:
 - i) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri;
 - ii) Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata;
 - iii) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;



- (3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan rincian kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata.
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, melalui kegiatan:
 - i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya;
 - ii) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - iii) Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- (4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan:
 - i) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah;
 - ii) Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya adalah sebesar Rp.899.918.850,00 atau 99,91%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

1. Standar Kompetensi dan Profesionalisme aparatur masih rendah.
2. Masih kurangnya fasilitas sanggar Budaya daerah yang ada di kecamatan-kecamatan.
3. Belum adanya fasilitas Rumah Adat di tingkat Kabupaten Bone Bolango
4. Belum adanya Perda tentang penerbitan Izin Usaha Pariwisata (Rumah makan,Cafe dan Bar)
5. Kurangnya promosi Pariwisata dan Budaya kabupaten Bone Bolango ke tingkat nasional dan internasional
6. Masih kurangnya fasilitas pendukung yang terdapat di obyek-obyek wisata
7. Belum adanya Master Plan dan DED tentang pengembangan Obyek Wisata Bahari Olele/Botutonuo.
8. Kurangnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan
9. Belum optimalnya peran Kelompok sadar wisata dalam mendukung upaya pengembangan kepariwisataan daerah.

Solusi :

1. Perlu adanya Bimtek dan Diklat tentang kepariwisataan serta keikutsertaan aparatur dalam pelatihan penyusunan RIPPDA.
2. Pembentukan sanggar-sanggar budaya ditiap kecamatan.
3. Perlu dibangun rumah adat/budaya ditingkat kabupaten.



4. Perlu adanya regulasi daerah yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata tentang penerbitan izin usaha/jasa pariwisata termasuk pengawasan dan pengendalian.
5. Perlu adanya penataan manajemen pemasaran pariwisata daerah dalam bentuk website atau sarana promosi lainnya, serta kerja sama dengan pengelola kepariwisataan lainnya.
6. Perlu adanya penambahan fasilitas pendukung di Obyek Wisata antara lain : Penambahan Cottage, Pembangunan Kolam Renang Anak, Tempat Ibadah, Restaurant dan Rumah Makan, Pengadaan Perahu kaca, perlengkapan Diving/Diving Centre, Akses jalan.
7. Segera dibuatkan Master Plan dan DED untuk pengembangan Obyek Wisata Bahari Olele/Botutonuo.
8. Perlu dilaksanakan sosialisasi sadar wisata.
9. Perlu adanya pemberian insentive kepada kelompok sadar wisata yang telah dibentuk.
10. Perlu penataan batas kawasan Obyek Wisata Lombongo.

e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan

Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam rangka pengembangan kelautan dan perikanan, maka program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan pada APBD Tahun 2010 sebesar Rp.3.072.009.439,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar melalui kegiatan:
 - i) Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (DAK);
 - ii) Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
- (2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan melalui kegiatan:
 - i) Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK);
 - ii) Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, melalui kegiatan:
 - i) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (DAK);
 - ii) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan;



- (4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan rincian kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.
- (5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu
 - i) Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap (DAK);
 - ii) Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap.
- (6) Program Minapolitan, Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebesar Rp.3.072.891.512,00 atau 97,91%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap antara lain PPI Tongo dan TPI Taludaa, serta belum adanya sarana dan teknologi pengolahan ikan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana Budidaya dalam menunjang Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
- c. Kurangnya tenaga Teknisi/Penyuluh di bidang Perikanan dan Kelautan

Solusi :

- a. Penataan kembali pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap antara lain melalui kerja sama dengan dunia usaha, mempertegas kepastian pengalihan aset PPI Tongo pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, serta inventarisasi aset-aset perikanan tangkap baik yang merupakan aset daerah ataupun bantuan sarana prasarana yang telah disalurkan kepada masyarakat.
- b. Perlu adanya penambahan Sarana dan Prasarana Budidaya dalam hal pembenihan rakyat dan saluran air tersier ke kolam rakyat
- c. Perlu adanya tenaga teknis / penyuluh Perikanan Budidaya, penyuluh perikanan Tangkap dan Pengawas Benih dan Mutu Hasil perikanan, serta pengadaan tenaga PPNS bidang perikanan

f. Urusan Pilihan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan



Program dan kegiatan untuk urusan pilihan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.1.863.441.400,00. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa.
- (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - i) Pengembangan Pasar Dan Distri Busi Barang / Produk (DAK);
 - ii) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
- (4) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan:
 - i) Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri;
 - ii) Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
- (5) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif, melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah.
- (6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi.

2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebesar Rp.1.861.321.300,00 atau 99,88%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada urusan perindustrian ini adalah kurangnya koordinasi pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Bone Bolango, baik antar SKPD terkait maupun dengan pihak Pemda Provinsi Gorontalo. Untuk itu solusinya adalah peningkatan



koordinasi yang dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi serta pelaksanaan lokakarya maupun workshop.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ini belum terdapat permasalahan.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas pemerintahan, yaitu asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi, dan asas Tugas Pembantuan (*medebewind*). Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah



pusat dan Pemerintah Daerah. Agar terlaksana pendanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta untuk mencegah tumpang tindih atau tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka perlu diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah di danai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur, atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari dasar itulah, maka beberapa departemen sektoral memberikan tugas pembantuan ke daerah untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pemberian Tugas Pembantuan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan umum. Disamping itu pemberian Tugas Pembantuan ini dimaksud untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Desa). Dengan demikian Tugas Pembantuan merupakan tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.

Sedangkan merujuk PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat pasal 1 ayat 4 bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum atau Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan Tugas Pembantuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen teknis ke daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. Adapun instansi pemberi Tugas Pembantuan yang melalui Departemen/Lembaga/Kementerian kepada daerah selang Tahun 2010 yang diterima oleh SKPD Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran dari Kementerian/lembaga
Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan)
Tahun Anggaran 2010

No.	Departemen/ Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen PMD	21.672.925.000
2.	Kementerian Pertanian RI	1.719.892.000
3.	Departemen Kelautan dan Perikanan RI	750.000.000
4.	Perhubungan	2.072.839.998
5.	Kemertrian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.000.000.000,00
6.	Block Grant dari KEMENDIKDAS RI melalui dana Dekon Dikpora Provinsi Gorontalo	472.113.000



7.	Block Grant dari KEMENDIKDAS RI melalui Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal (BPPNFI) Regional Makassar	286.948.800
8.	Block Grant dari KEMENDIKDAS RI melalui Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Provinsi Gorontalo	50.000.000
JUMLAH TOTAL		28.024.718.798,00

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan dari Departemen/ Lembaga/ Kementerian melalui program pada masing-masing SKPD di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan DIPA masing-masing kegiatan. Adapun SKPD Kabupaten Bone Bolango yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan dan hasil dari pelaksanaan berupa realisasi program/kegiatan yang diterima SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2010
Berdasarkan SKPD Penerima

No	SKPD Penerima	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Departemen/ Lembaga Pemberi
			Anggaran (Rp,00)	%	
1.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.672.925.000	18.891.981.028	87,17	Depdagri Dirjen PMD
2.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	1.719.892.000	1.120.532.979	65,15	Kementerian Pertanian/Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian
3.	Dinas Perikanan dan Kelautan	750.000.000	737.702.100	98,36	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
4.	Dinas Perhubungan	2.072.839.998	2.064.000.000	99,57	Perhubungan
5.	BAPPEDA	1.000.000.000,00	342.193.950,00	34,24	Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
6.	Sanggar Kegiatan Belajar	60.000.000	60.000.000	100	Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	15.000.000	15.000.000	100	Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	13.800.000	13.800.000	100	Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	64.800.000	64.800.000	100	Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	16.250.000	16.250.000	100	Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	19.678.000	19.678.000	100	Kemdiknas melalui



	Belajar					BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	38.300.000	38.300.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	20.852.000	20.852.000	100		Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	81.900.000	81.900.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	156.660.000	156.660.000	100		Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	132.750.000	132.750.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	32.208.800	32.208.800	100		Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	46.563.000	46.563.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	19.000.000	19.000.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	35.000.000	35.000.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	15.000.000	15.000.000	100		Kemdiknas Melalui Dikpora Provinsi
	Sanggar Kegiatan Belajar	30.000.000	30.000.000	100		Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
	Sanggar Kegiatan Belajar	11.300.000	11.300.000	100		Kemdiknas melalui BPPNFI Reg. V Makassar
J U M L A H		28.024.718.798,00	23.965.471.857,00			85.51

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :

➤ **Badan pemberdayaan masyarakat desa**

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaan dan Kecamatan tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp.21.672.925.000,00 dan realisasi sebesar Rp.18.891.981.028,00 atau 87,18%.



➤ **Badan pelaksana Penyuluh pertanian, perikanan dan peternakan**

- a. Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) FEATI, kegiatannya meliputi:
- 1) Penyusunan Program dan Rencana Kerja, dilaksanakan pada tahun 2010 dimana sub kegiatannya terdiri dari Perencanaan Tahunan Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kabupaten dan penyusunan laporan FMA secara partisipatif di tingkat desa;
 - 2) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, untuk tahun 2010, dilaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitasi FMA Oleh TPL dan Dukungan Fasilitasi FMA Oleh TPOP tingkat kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan Ceramah / Diskusi, untuk tahun 2010 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Lokakarya Jejaring Dan Koordinasi Kelompok Tani, fasilitasi dan penumbuhan asosiasi/ federasi/organisasi tani di kabupaten, dan Temu Teknologi Antara Peneliti Dan Petani Di BPTP;
 - 4) Rapat-Rapat Koodinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja, untuk tahun 2010 dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Tim Verifikasi VMA Di Kabupaten;
 - 5) Rencana Anti Korupsi, dilaksanakan 2010 dengan sub kegiatannya yaitu pemberantasan korupsi;
 - 6) Rehabilitasi bangunan gedung negara dilaksanakan tahun 2010.
 - 7) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha (FMA), untuk tahun 2010 Bantuan Langsung Bagi Unit Pengelola FMA Desa dan Bantuan Langsung Bagi Unit Pengelola FMA kabupaten.
 - 8) Pengadaan mubelair, dilaksanakan pada tahun 2010 melalui kegiatan pelaksanaan pameran pertanian.
 - 9) Pengadaan alat kantor, dilaksanakan tahun 2010.
 - 10) Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan, dilaksanakan tahun 2010, sub kegiatannya evaluasi pertengahan masa program kabupaten, Pelaporan Kemajuan Pelaksaaan Kegiatan dan Konsolidasi Audit.

➤ **Dinas perikanan dan kelautan**

Program Pemberdayaan Sumberdaya Perikanan, melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat pada tahun 2010 dengan anggaran sebesar



Rp.750.000.000,00 dengan realisasi Rp.737.702.100,00 atau 98,36%.

➤ **Dinas perhubungan**

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, melalui kegiatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp.2.072.839.998,00 dan realisasi sebesar Rp.2.064.000.000,00 atau 99,57%.

➤ **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Pengembangan Ekonomi Lokal melalui kegiatan Kementrian Daerah Tertinggal tahun 2010 dengan anggaran Rp.1.000.000.000,00 dan realisasi Rp.342.193.950,00 atau 34,22%

➤ **Dinas Kesehatan**

- Program Peningkatan Sarana dan parasara aparatur melalui kegiatan pembangunan rumah dinas dokter dan paramedis yang dilaksanakan tahun 2010, 2 unit di kecamatan dan kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 3 unit di kecamatan.
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya tahun anggaran 2010 melalui kegiatan :
 - Pembangunan Puskesmas (puskesdes) yang berlokasi di kecamatan bulango timur desa bulotalangi 1 unit dan desa popodu 1 unit, di kecamatan bone desa ilohu'uwa 1 unit, di kecamatan botupingge desa timbuwolo i unit dan desa tanah putih 1 unit dan kecamatan bulango utara desa kopi 1 unit.
 - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 6 unit di kecamatan
 - Pengadaan alat promosi kesehatan (promokes), lokasi dinas kesehatan
 - Pengadaan alat kesehatan, lokasi dinas kesehatan
 - Pengadaan sistim informasi kesehatan 1 pt, lokasi dinas kesehatan
- Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan melalui kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2010

➤ **Sanggar Kegiatan Belajar**



Program Sanngar Kegiatan Belajar, melalui kegiatan PAUD Rintisan, PAUD Kelembagaan, Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan, Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar, Paket A Setara Kelas Lanjutan, Paket A Setara Kelas Awal/Baru, Paket B setara SMP Kelas Lanjutan, Paket B setara SMP Kelas Awal, Paket C setara SMA Kelas Awal, LIFE SKILL (kursus wirausaha desa), BLOCK GRANT peningkatan mutu PTK-PNF, Diklat Pendidik PAUD, BOP SIM PNF, dan BOP Pemetaan dengan anggaran sebesar Rp.809.061.800,00 dengan realisasi Rp. 809.061.800,00 atau 100%.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp.28.024.718.798,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.965.471.857,00 atau 85,81%, sedangkan rincian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan serta realisasi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada **tabel 5.3.**

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Komitmen dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi pra-syarat mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala regional menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Olehnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan



pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahap pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan mengedepankan integrasi dan kerjasama seluruh elemen pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan dan Kegiatan

Arah kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi dan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam rangka peningkatan daya saing wilayah. Kerjasama tersebut diarahkan pula dalam upaya percepatan pembangunan wilayah termasuk pembangunan daerah perbatasan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus berpartisipasi dan mengembangkan koordinasi antar daerah melalui beberapa wadah kerja sama, antara lain Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI) dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).

Selain program kerjasama pembangunan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat pada beberapa program strategis, yang antara lain:

- a) Penanggulangan kemiskinan melalui program nasional PNPM, PKH, JAMKESMAS/JAMKESDA dan RASKIN.
- b) Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
- c) Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Program Percepatan Kawasan Pembangunan Daerah tertinggal (P2KPDT) pada kementerian daerah tertinggal.
- d) Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) FEATI pada Kementerian Pertanian/Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian



B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Selain pengembangan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengembangkan pula kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan institusi lokal, nasional maupun lembaga donor internasional dalam upaya pengembangan infrastruktur wilayah dan sentra-sentra ekonomi produktif di wilayah pedesaan, serta pengembangan sumber daya manusia.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat digambarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam bidang desain dan konstruksi prasarana proyek-proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kerjasama secara terus menerus dengan berbagai konsultan, perusahaan konstruksi dan perusahaan pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam bidang pengembangan sumber daya aparatur, beberapa kerjasama yang telah dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Realisasi	Pelaksana
1.	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Sebanyak 8 (delapan) orang aparatur pemerintah daerah yang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana (S2)	IAIN Sunan Kalijaga Jogja
2.	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Sebanyak 40 (empat puluh) orang aparatur pemerintah daerah yang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana (S2)	STIA-LAN Makassar
3.	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	sejumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan Strata Satu (S1)	UNG, UG, STIA BINA TARUNA, UNISAN Provinsi Gorontalo



3. Kerja Sama Dengan Lembaga Donor Internasional

No	Bidang Kerjasama Tahun 2010	Pihak Ketiga	Instansi Penanggung Jawab
1	Program Sulawesi Water and Sanitation Hygiene (SWASH)	CIDA, Care International Indonesia	Bappeda
2	Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan berkelanjutan (Environmental Governance And Sustainable Livelihood Program)	CIDA (Canadian International Development Agency)	Bappeda
3	Akses Pendidikan WDD/WSD	Australia	Dinas Pendidikan Nasional
4	Pengembangan Model Operasional Desa Siaga	DHS 2 ADB dan Masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Penataan pengelolaan keuangan daerah	BPKP	BPKAD
7	Pembangunan infrastruktur daerah	ASPEKINDO dan Pengusaha konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait
8	Program Jaminan kesehatan masyarakat daerah	ASKES	Dinas kesehatan

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* ada tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dimana ketiga lembaga tersebut harus berjalan sinergi dan terkoordinir dengan Instansi Vertikal, guna sebagai penyeimbang *check and balance* dalam melahirkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Hubungan koordinasi dengan instansi Vertikal ini dibangun dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang ada, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih untuk mendorong pelaksanaan program agar bisa berjalan optimal dengan hasil maksimal untuk mencapai tujuan.

1. Kebijakan dan Kegiatan



Kebijakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango diarahkan dalam rangka membangun dan mempermantap komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta menjamin sinergitas dan integritas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara konsisten dan terus menerus mengembangkan koordinasi program dan kegiatan bidang pembangunan, administrasi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, yang dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah dan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan dengan program Pemerintah Daerah atau antar instansi vertikal.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1). Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), yang diselenggarakan dalam rangka membahas dan mencari solusi atas beberapa agenda, isu dan kondisi yang berkenaan dengan upaya menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Instansi vertikal yang terlibat terdiri dari : Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Pengadilan Negeri Gorontalo, Kepolisian Resort Bone Bolango dan KODIM 1304 Gorontalo. Koordinasi forum MUSPIDA tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan hasil dan manfaat berupa terwujudnya kestabilan dan keamanan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga bertindak lanjut pada terwujudnya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
- 2). Forum Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA), yang diselenggarakan dalam rangka mempermantap dan memperkokoh kondisi keamanan dan ketertiban wilayah. Instansi vertikal yang terlibat terdiri dari Kapolisian Daerah Gorontalo, Kepolisian Resort Bone Bolango dan KODIM 1304 Gorontalo. Yang menangani forum KOMINDA adalah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango. Pelaksanaan forum koordinasi tersebut dilaksanakan secara periodik ataupun bersifat insidentil dengan hasil diperolehnya informasi tentang kondisi politik dan keamanan wilayah, serta ditetapkannya langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan wilayah.



- 3). Dalam bidang pengembangan statistik daerah telah dilaksanakan kerjasama dengan Kantor Statistik kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan data makro daerah antara lain:
 - a). Dokumen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
 - b). Kabupaten Dalam Angka (KDA)
 - c). Kecamatan Dalam Angka (KcDA)
 - d). Indikator Sosial Budaya
- 4). Dalam bidang pendataan dan penataan aset/tanah milik daerah dilakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dengan penanggungjawab Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bone Bolango.
- 5). Dalam rangka Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dikembangkan kerja sama dengan BPKP perwakilan Manado.
- 6). Dalam bidang pelestarian kawasan hutan telah dilaksanakan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan dalam rangka perlindungan Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melalui program GERHAN.
- 7). Dibiidang kehidupan keagamaan, kegiatan kerjasama dengan Kantor Departemen Agama yang telah dilaksanakan yakni difokuskan pada peningkatan pelayanan kehidupan beragama berupa pelayanan pendidikan, urusan ibadah dan haji serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam bentuk forum lintas agama (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama).
- 8). Dalam bidang penanggulangan bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan koordinasi yang terus menerus dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah, kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Sebagai dasar hukum eksistensi wilayah memberi makna bahwa suatu daerah yang telah berdiri sendiri harus memperoleh pengakuan publik yang harus didukung dengan Peraturan Perundang-undangan



atau dengan kata lain wilayah yang telah berdiri sendiri perlu memiliki batas wilayah yang jelas dan pasti yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Tapal Batas.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan melalui koordinasi bersama antar pemerintahan baik antar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan, maupun melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Pembinaan tapal batas tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam pembinaan batas wilayah adalah

- Adanya tapal batas yang terletak pada taman nasional yang sulit dijangkau dan jarak antar tapal batas terlalu jauh.
- Disinyalir adanya pemindahan patok tapal batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang berbatasan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memprogramkan fasilitasi percepatan pembuatan dan peninjauan tapal batas.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango sangat rawan akan bencana alam, baik itu bencana banjir dan abrasi pantai. Salah satu penyebab bencana banjir tersebut karena rusaknya kawasan hutan pada



dua daerah aliran sungai (DAS) yang besar yaitu DAS Bulango dan DAS Bone, dimana kedua DAS tersebut melewati sebagian wilayah Kota Gorontalo dan bermuara ke laut Teluk Tomini, serta tiga DAS yang kecil yang terdapat di desa Bilungala, Tombulilato, dan Talu'da. Dimana ketiga DAS tersebut berada pada wilayah pesisir garis pantai. Sedangkan terjadinya abrasi pantai disebabkan oleh beberapa wilayah pantai yang belum memiliki bangunan pengendalian pantai (*Break water*).

1. Bencana Yang terjadi dan Penanggulangannya

a. Bencana yang terjadi pada tahun 2010

Sepanjang tahun 2010 tidak terjadi bencana alam yang separah pada tahun 2007-2008. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2009 masih bersifat lokal, seperti angin puting beliung dan kebakaran yang disebabkan oleh perubahan iklim (*climate changes*) dan kesalahan manusia (*human error*). Kesemuanya itu tidak lepas dari prilaku dan pola hidup manusia (*Life style*), serta dinamika pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang begitu cepat.

Dengan menerapkan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya bencana alam, tidak serta merta bencana bisa dihindari tanpa kesadaran dan kesungguhan masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupannya sehari-hari, dan lebih penting lagi adalah intervensi dari pemangku kepentingan di daerah tersebut dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

b. Penanggulangan Bencana

Dalam penanggulangan bencana ini, tidak sampai menyita perhatian atau mengalokasikan sebagian anggaran Pemerintah Daerah, karena status bencana yaitu bencana lokal dan sifatnya ringan yang bisa diatasi oleh masyarakat setempat.

Akan tetapi Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin siap dalam menevakuasi korban bencana, dan memperbaiki sarana umum pasca bencana, serta membangun terus jaringan komunikasi dengan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo, mengingat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum mempunyai fasilitas Pemadam Kebakaran (DAMKAR).

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi atau Lokal / Kabupaten/ Kota)

Bencana yang terjadi di Propinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Bone Bolango sifatnya lokal dan dapat ditanggulangi.



3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penanggulangan bencana pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp.12.958.952.000,- yang dimanfaatkan untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi pasca bencana banjir pada beberapa wilayah kecamatan.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, maka dilakukan upaya tindakan sistematis dan terencana serta berkesinambungan meliputi :

- Menentukan titik evakuasi
- Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana alam
- Merelokasi masyarakat yang berada didaerah rawan bencana seperti daerah pingiran sungai, pesisir pantai dan dilereng pegunungan.
- Membuat peta rawan bencana sekaligus menyampaikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- Pembentukan satuan tugas (SATGAS) penanggulangan bencana alam dimasing-masing wilayah administrasi yakni kecamatan dan desa.
- Peningkatan kemampuan anggota SATKORLAK dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka termasuk peningkatan kepedulian kepada seluruh masyarakat untuk mau menolong sesama ketika terjadi bencana.
- Mempersiapkan sebagian peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana
- Menyusun mekanisme pola penyelamatan dan evakuasi
- Menyiapkan dana cadangan bersumber dari APBD untuk program tanggap darurat apabila terjadi bencana alam.
- Penanggulangan Banjir Sungai Palanggua Desa Langge - Desa Dunggala, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Poowo Barat, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Tapadaa, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Mopuya, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Panggulo, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Bandungan,
- Pembuatan Abrasi Pantai Tersebar dilokasi Desa Molotabu, Tamboo, Biluango, Kaidundu Barat, Kaidundu, Sogitia, Pelita.
- Pembuatan Drainase diKecamatan Botupingge Tersebar diDesa Panggulo dan Desa Timbuolo Tengah, Pembuatan Drainase Desa Libungo.
- Pembentukan Tim Tagana
- Pembentukan Tim Satgawa
- Rencana pembentukan TRC (Tim Reaksi Cepat)



5. Potensi Bencana Yang diperkirakan Terjadi

a. Banjir

Kabupaten Bone Bolango terdapat 2 (dua) daerah aliran sungai (DAS) besar yakni DAS Bone dan DAS Bulango serta puluhan DAS kecil lainnya yang tersebar pada kecamatan dan desa. Sungai merupakan potensi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat di sekitarnya, apabila dikelola dan dipergunakan secara arif dan bijaksana. Selain bermanfaat, sungai juga memiliki potensi bencana banjir yang dapat merusak sistem lingkungan hidup. Di Kabupaten Bone Bolango khususnya pada beberapa kecamatan dan desa yang berada di sepanjang bantaran sungai setiap tahun terutama pada musim penghujan selalu dilanda bencana banjir baik banjir bandang maupun banjir tergenang air karena luapan sungai. Banjir bandang biasanya terjadi pada sungai-sungai kecil seperti Sungai Boliiohuto dan Sungai Wapo di Lombongo Kec. Suwawa Tengah; Sungai Wulo dan Sungai Sandawule di Molintogupo dan Libungo; Sungai Dumbata di Bolontala Timur Suwawa Selatan; Sungai Ulanta di Desa Ulantha Kecamatan Suwawa; Sungai Popalo dan Peyapata di Kecamatan Tilongkabila. Sedangkan lokasi desa yang berpotensi mengalami banjir karena luapan sungai adalah desa-desa yang berada di sepanjang bantaran DAS Bone antara lain Desa Tulabolo, Tulabolo Timur, Tulabolo Barat, Tilangobula, Dumbayabulan, Panggulo, Bonedaa, Bodaraya, Bondauna, Lompotoo, Tolomato, Lombongo, Alale dan Duano, Tingkohubu, Boludawa, Bube, Dutohe, Tangglingo, Padengo, Oluhuta, Tumbihe, dan Pauwo.

Selain di sepanjang DAS Bone, potensi banjir juga terdapat di sepanjang DAS Bulango. Desa-desa yang berada di sepanjang DAS Bulango.

b. Kebakaran

Kebakaran yang sering terjadi disebabkan adanya aliran listrik yang tidak sempurna dan sebagian karena kelalaian dalam penggunaan lampu teplak, lilin dll, mengingat masalah kelistrikan masih lama akan teratasi maka kemungkinan – kemungkinan penggunaan pengganti lampu listrik masih akan digunakan.

c. Gempa Bumi

Mengingat posisi pulau Sulawesi dilintasi oleh lempeng Indo Australia dan Euro Asia oleh karenanya tidak menutup kemungkinan terjadinya gempa diwilayah Propinsi Gorontalo.



F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Penetapan kawasan khusus di daerah otonom dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional seperti halnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan pengembangan industri strategis dan berteknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga permasyarakatan spesifik). Oleh karena itu, dalam penetapan kawasan khusus Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Ditinjau dari penjelasan diatas Kabupaten Bone Bolango belum memiliki kawasan khusus seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya memiliki kawasan lindung yakni Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering tmbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di wilayah Kabupaten BoneBolango hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

1. Gangguan yang Terjadi

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2007, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketetraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, minum-minuman keras dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi.



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

- a. Institusi diluar Pemerintah Daerah, adalah :
 - Kepolisian
 - Kejaksaan
 - TNI.
- b. Institusi lingkup Pemerintah Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Satpol dan Perlindungan Masyarakat.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tugas dan fungsi kewenangan Satuan kerja perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik yang memiliki sumber daya aparatur dalam rangka menjalankan tugas operasional tehknis sesuai dengan Tupoksi yang diuraikan diatas, menyangkut jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

JENJANG PENDIDIKAN	APARAT			
	PNS	TENAGA HONOR NON DATABASE	TENAGA KONTRAK	TENAGA ABDI
Pasca Sarjana	2	-	-	-
Sarjana	9	-	5	-



Diploma	2	-	4	-
SLTA	3	-	10	-
SMP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
JUMLAH	16	0	19	0

Sumber Data : Badan Kesbangpol Satpol dan Linmas Bone Bolango 2009

4. Penanggulangan.

Jika terjadi suatu kejadian diwilayah Kabupaten Bone Bolango, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Institusi dan saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sesama aparat di lapangan.

Disamping itu pula, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan secara penuh KOMIDA (Komunitas Intelejen Daerah) dengan maksud memberikan keamanan lingkungan yang kondusif, sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri, utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.

Berbagai konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Dengan adanya KOMIDA merupakan wadah kerjasama antara TNI, POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait/vertikal, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dan mengumpulkan informasi-informasi baik dari perorangan maupun sekelompok masyarakat dalam bentuk intelejen, serta lapor cepat/tindak cepat guna disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dalam pengambilan keputusan.

BAB VII PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi substansi strategis Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango Tahun 2009 yakni sebagai berikut :

1. Dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun faktor pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi tercapainya visi Kabupaten Bone Bolango.
2. Secara umum indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun diakui masih terdapat kekurangan yang tidak berimplikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum tercapainya target pendapatan dalam kurung waktu dua belas bulan selama tahun 2010, bukanlah pencerminan rendahnya kinerja aparatur dalam mengali sumber-sumber pendapatan PAD, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, misalnya; (a) regulasi pendukung yang mengatur retribusi belum sepenuhnya diatur; (b) masih ada regulasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (c) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menaati regulasi tentang retribusi dan sejenisnya masih relatif rendah; (d) belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana publik yang menghasilkan sumber pendapatan retribusi daerah.
4. Untuk penyerapan (realisasi) belanja daerah kurang dari target yang ditetapkan merupakan suatu hal logis dan positif, sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang mengutamakan adanya efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.
5. Setiap permasalahan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2010 telah ditempuh pemecahannya melalui pendekatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

B. Saran



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, disamping merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Governance* juga merupakan proses yang bersifat adminisistratif sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah, sehingga terbangun proses *Check and Balance* antara Eksekutif dan Legislatif.

Oleh karena itu melalui proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dari semua elemen pembangunan daerah guna tercapainya komitmen bersama yakni terwujudnya pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) janganlah hanya sebatas rutinitas belaka atau hanya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi yang lebih penting adalah kesungguhan bersama untuk menyatukan presepsi, komitmen seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2010 ini dibuat, untuk disampaikan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi bahan pembahasan bersama.